



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**



RAT 2024 **Kemiskinan**

Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl Khatib Sulaiman No. 1, Kecamatan Padang Barat, Padang (26222)
Telp. 0751-7055676, 7052223, Fax: 0751-7055676

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini bisa diselesaikan sesuai rencana. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kemiskinan beserta dampak yang ditimbulkannya. Selain tetap konsisten menjalankan program penanggulangan yang sudah ada (reguler), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menjalankan program pengaman sosial dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat miskin, rentan serta masyarakat lainnya.

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2024 berisi penjelasan mengenai kondisi kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta target program dan anggarannya selama Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Sekretariat TKPK Provinsi Sumatera Barat serta kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Akhirul kalam, ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan ini. Semoga bermanfaat sebagai bahan perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat.

Padang, Juni 2023
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Selaku Sekretaris TKPK
Provinsi Sumatera Barat,



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 1999031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum dan Kebijakan Operasional	4
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI	
TAHUNAN TAHUN SEBELUMNYA	6
2.1. Kondisi Umum Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat	6
2.2. Hasil Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan	17
2.3. Hasil Evaluasi Bidang Kesehatan	19
2.4. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan	20
2.5. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar	23
2.6. Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Non Konsumsi	28
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN	
BERJALAN	37
3.1. Penentuan Lokasi Prioritas	37
3.2. Target Penurunan Persentase Kemiskinan	47
BAB IV RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024	49
4.1. Strategi dan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024	49
4.2. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid 19	51
4.3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024	52

BAB I

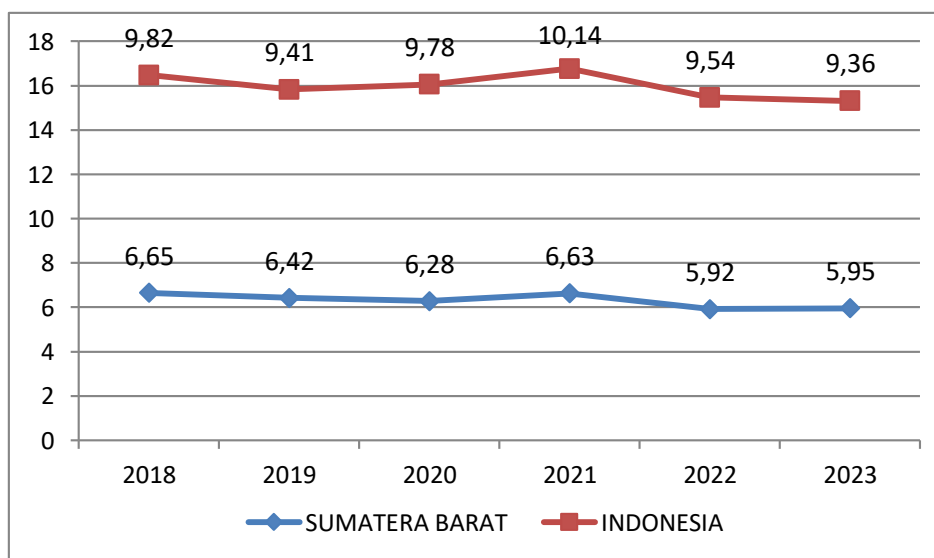
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan baik secara nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya harus bersifat lintas sektor dan lintas program. Penurunan tingkat kemiskinan nasional dalam lima tahun terakhir ini cenderung mengalami pelambatan. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran penurunan kemiskinan secara jangka menengah terutama apabila penanganan program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami perubahan yang signifikan atau melakukan *“business as usual”*, padahal diharapkan upaya dan kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah dan para pihak dapat menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi penurunan tingkat kemiskinan secara nasional. Upaya penurunan angka kemiskinan dua tahun terakhir seakan tidak ada artinya bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hal itu disebabkan pada awal tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Sebagai gambaran, berikut disajikan perkembangan persentase penduduk miskin di Sumatera Barat dan Indonesia pada tahun 2018-2023.

Grafik 1.1

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi Sumbar 2023

Secara umum persentase penduduk miskin pada periode tahun 2018-2023 di Sumatera Barat berada dibawah nasional dengan pada persentase tahun 2018 berada pada angka 6,65 persen dibandingkan dengan nasional sebesar 9,82 persen, dengan kondisi pada tahun 2023 sebesar 5,95 persen dibandingkan dengan nasional sebesar 9,36 persen dan menempatkan Sumatera Barat dengan persentase kemiskinan terendah ke-7 secara nasional dan ke-3 terendah secara regional diwilayah sumatera.

Berdasarkan perkembangannya, dampak pandemi Covid-19 cukup berpengaruh nyata terhadap kenaikan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dan nasional. Hal ini sebagaimana terlihat pada kenaikan persentase kemiskinan pada tahun 2021 yang menjadi persentase kemiskinan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Keberadaan kasus pandemi Covid-19 juga telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan pemerintah sebagai langkah penanggulangan, salah satunya adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah provinsi termasuk di Sumatera Barat. PSBB tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan terjadinya perubahan perilaku sosial dan budaya dalam masyarakat yang dampaknya cukup dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari kelompok masyarakat yang berada pada golongan menengah sampai dengan golongan yang paling bawah. Selain itu, untuk meringankan beban ekonomi masyarakat selama masa pandemi pemerintah juga melaksanakan penyaluran program bantuan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Ditengah kondisi yang disertai dengan ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir telah menyebabkan ketidakpastian yang berdampak terhadap penurunan pendapatan atau semakin bertambahnya jumlah pekerja yang dirumahkan dan bahkan di PHK dan secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Disamping bantuan sosial dari pusat, selama masa pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga turut serta menyalurkan dana pendampingan melalui perlindungan sosial dan bantuan sosial serta kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu mendorong berjalannya perekonomian masyarakat. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat memperlambat potensi kenaikan jumlah penduduk miskin yang terdampak oleh hilang atau berkurangnya pendapatan masyarakat terutama masyarakat rentan miskin. Selain itu berbagai program yang mampu mengurangi pengeluaran penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan penduduk miskin senantiasa menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Berbagai kondisi diatas juga ditambah dengan kendala ketersediaan data penduduk miskin yang belum diperbaharui. Sehingga penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemi harus dimasukkan ulang ke dalam data terkini, dimana masih terjadinya inclusion dan exclusion error pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masih perlu adanya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) karena belum ada padanan data antara DTKS dengan NIK penerima Jaring Pengaman Sosial yang berkaitan dengan penyaluran program jaring pengaman sosial yang akan digulirkan. Ketepatan dan kesesuaian target turut menentukan sukses tidaknya program jaring pengaman sosial yang dilaksanakan dalam pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, serta mendorong pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil yang utamanya menasar level usaha mikro kecil menengah yang rentan terdampak pandemi Covid-19. Mengantisipasi kondisi tersebut maka diperlukan dukungan kebijakan yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk bertahan dalam kondisi krisis disamping terus meningkatkan sinergisitas program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengupayakan agar penanggulangan kemiskinan terutama di Sumatera Barat dapat lebih terarah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) tahun 2021-2026 yang didukung dengan dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) untuk tahun 2024 untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang “Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota”. Dalam pelaksanaannya, TKPK Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diatas maka TKPK Provinsi Sumatera Barat perlu penyusunan Rencana Aksi Provinsi sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 yang selanjutnya disebut sebagai dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi Sumatera Barat Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Operasional

Dasar hukum penyusunan Dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
2. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program – program percepatan penanggulangan kemiskinan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPL dalam koordinasi dan pengendalian.
4. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program – program rakyat.
5. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen RAT Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan satu tahun kedepan.
2. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan penganggaran perangkat daerah berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan,
3. Memberikan arah untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Tujuan disusunnya Dokumen RAT Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan permasalahan yang kompleks dan multidimensi sehingga perlu menyusun konsep antisipasi terhadap perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik nasional maupun di daerah,

2. Mengevaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya per bidang/urusan,
3. Menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan per bidang/urusan serta target keberhasilan indikator penanggulangan kemiskinan beserta lokasi prioritas program;
4. Melakukan penjabaran prioritas program yang tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 menjadi Rencana Aksi Provinsi Sumatera Barat bidang penanggulangan kemiskinan tahun 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUNAN
TAHUN SEBELUMNYA

BAB III : KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN BERJALAN

BAB IV : RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2024

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Umum Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang perlu diatasi melalui pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan perekonomian. Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun, belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan ini dalam satu definisi yang disepakati bersama.

Menurut Adji dkk. (2020) mengutip publikasi Bank Dunia yang berjudul: *Attacking Poverty*, mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dengan standar kehidupan layak tidak tercapai. Bank Dunia menggunakan ketidakcukupan sandang, pangan, dan papan; ketidakmampuan untuk mengakses perawatan kesehatan; dan rendahnya akses terhadap pendidikan, sebagai indikator untuk menandai seseorang dikategorikan miskin atau tidak.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. PBB mengajukan beberapa indikator teknis yang lebih spesifik dapat digunakan sebagai penanda miskin atau tidaknya seseorang, seperti kurang gizi, buta huruf, kesehatan yang buruk, pakaian dan perumahan yang tidak layak, dan ketidakberdayaan.

Ini berarti bahwa perspektif yang digunakan menentukan miskin dan tidaknya seseorang pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi sanitasi dan lingkungan. Bila kita mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

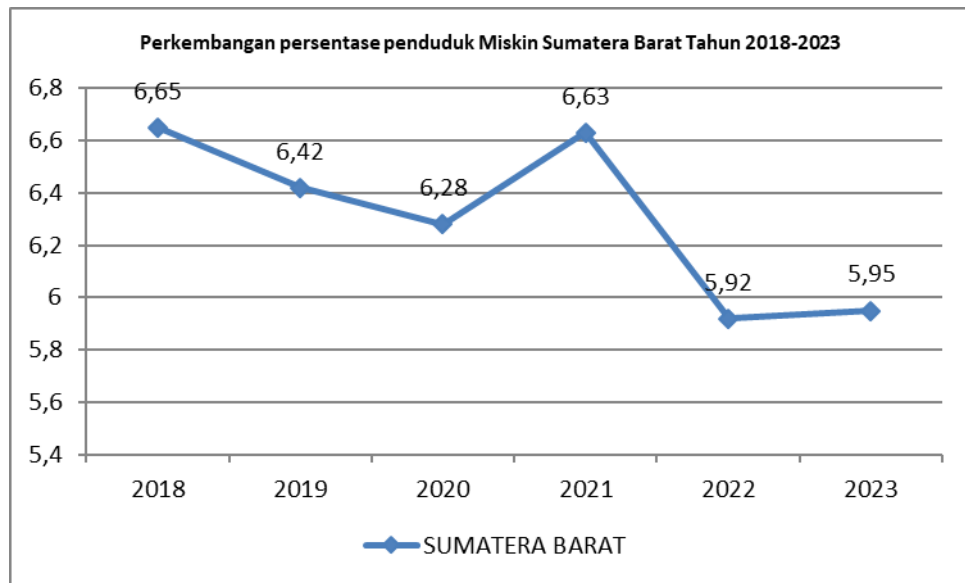
Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka dalam penyusunan dokumen RPKD Provinsi Sumatera Barat, TNP2K membagi profil kemiskinan daerah menjadi dua kelompok bidang besar yakni kemiskinan bidang konsumsi dan kemiskinan bidang non konsumsi, serta beberapa sub bidang dan indikator kinerja (berisi realisasi/capaian dan target) yakni pengeluaran/konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, ekonomi, fiskal, pendapatan dan belanja daerah, serta indikator daerah lainnya.

2.1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0)

Secara umum persentase penduduk kemiskinan Sumatera Barat dari tahun 2018 sampai 2023 memiliki tren perkembangan yang terus menurun meski sempat mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh perkembangan pandemi Covid 19 yang menyebabkan terjadinya lonjakan kemiskinan pada tahun 2021. Berdasarkan perkembangannya, pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Sumatera Barat sebesar 6,65 dan mengalami penurunan 0,23 persen menjadi 6,42 persen pada tahun 2019. Kondisi tersebut terus turun menjadi 6,28 persen pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Sumatera Barat mengalami kenaikan menjadi 6,63 persen atau naik sebesar 0,35 persen dan kembali menurun pada tahun 2022 persentase penduduk miskin Sumatera Barat menjadi 5,92 persen atau turun sebesar 0,71 persen. Berdasarkan kondisi terkini, persentase penduduk Sumatera Barat pada tahun 2023 sedikit mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 5,95 persen atau naik sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun 2022. Berikut disajikan data perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) di Sumatera Barat tahun 2018-2023.

Grafik 2.1
Perkembangan persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat tahun 2018-2023

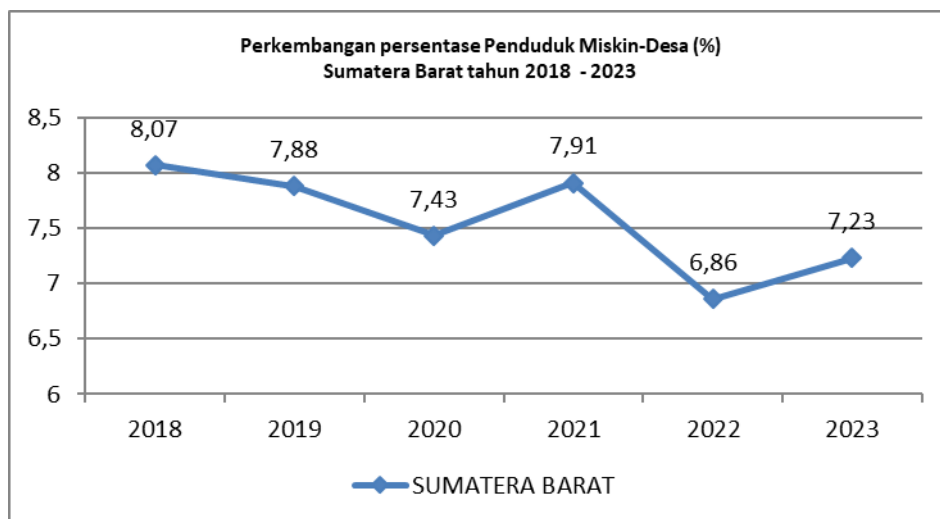


Sumber : BPS

2.1.1.1 Kemiskinan Perdesaan

Perkembangan kemiskinan berdasarkan daerah pada wilayah perdesaan mengalami tren perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan tren yang semakin menurun sebagaimana disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.2
Perkembangan persentase Penduduk Miskin-Desa Sumatera Barat tahun 2018 – 2023



Sumber : BPS Sumbar

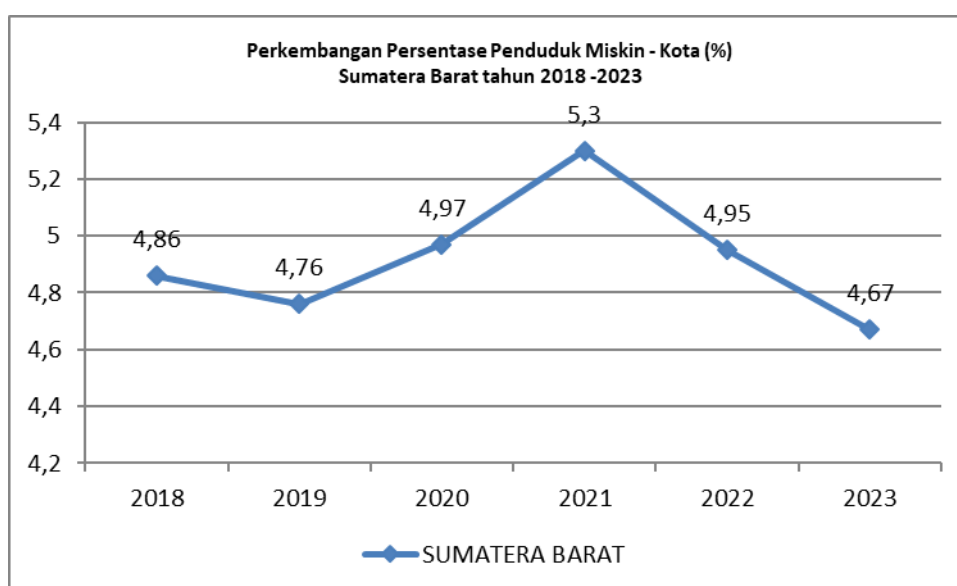
Berdasarkan perkembangan diatas, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada tahun 2018 Sumatera Barat berada pada angka 8.07 persen dan cenderung menurun pada Tahun 2019 menjadi sebesar 7,88 persen atau turun 0,19 persen. Kondisi tersebut terus menurun hingga pada tahun 2020 mencapai angka 7,43

persen atau turun 0,45 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Seiring dengan kondisi pasca pandemi Covid 19, persentase penduduk miskin perdesaan tahun 2021 0,48 persen menjadi 7,91 persen dan kembali mengalami penurunan 1,05 persen pada tahun 2022 menjadi 6,86 persen. Sementara pada tahun 2023 kondisi tersebut kembali mengalami kenaikan 0,37 persen menjadi sebesar 7,23. Berdasarkan perkembangannya, secara umum dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat pada periode tahun 2018-2020 terdapat penurunan sebesar 0,64 persen kemudian naik sebesar 0,48 pada Tahun 2021 dan turun sebesar 0,68 persen pada Tahun 2023.

2.1.1.2 Kemiskinan Perkotaan

Sementara perkembangan kemiskinan berdasarkan daerah pada wilayah perkotaan juga mengalami tren perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan tingkat kemiskinan pada wilayah perdesaan dengan tren yang semakin menurun sebagaimana disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.3
Perkembangan persentase Penduduk Miskin-Perkotaan Sumatera Barat tahun 2018-2023



Sumber : BPS Sumbar

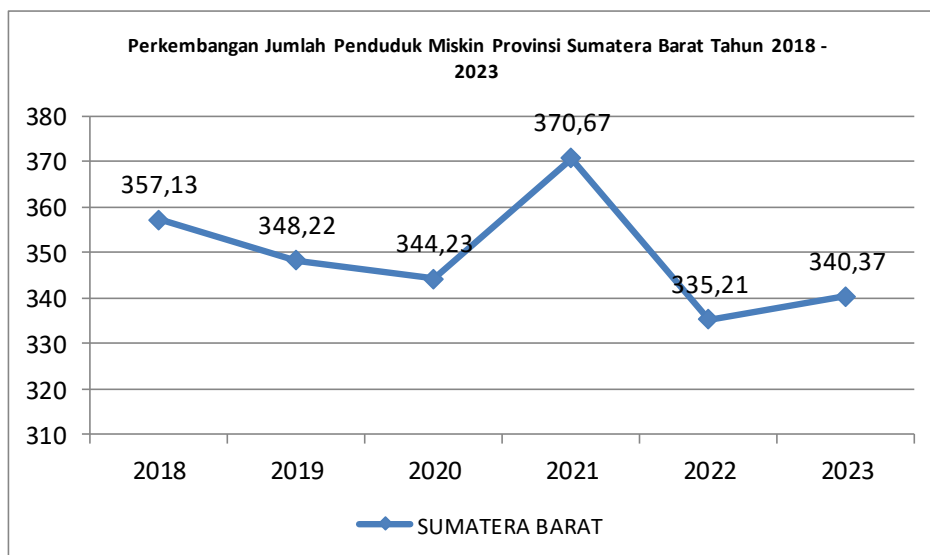
Berdasarkan perkembangannya, persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat pada tahun 2018 sebesar 4,86 persen dan terus turun menjadi 4,76 persen pada tahun 2019 atau turun sebesar 0,10 persen, serta turun 0,21 persen pada tahun 2020 dan mencapai angka 4,97 persen atau dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi tersebut kemudian mengalami kenaikan 0,33 persen menjadi 5,3 persen pada tahun 2021 yang dipengaruhi oleh kondisi pasca pandemi Covid 19. Fluktuasi

tersebut kemmbali mengalami penurunan pada tahun 2022 0,35 persen dengan capaian sebesar 4,95 persen. Sementara kondisi pada akhir tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 0,28 persen menjadi 4,67 persen.

2.1.2 Jumlah Penduduk Miskin

Secara umum, perkembangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat memiliki tren yang menurun. Selama periode tahun 2018 sampai 2020, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan 1,290 jiwa, kondisi tersebut kemudian mengalami kenaikan pasca Covid 19 di tahun 2021 sebanyak 2.644 jiwa. Data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Sumatera Barat adalah 357,130 jiwa, kemudian turun sebanyak 891 jiwa di tahun 2019 menjadi 348,220 jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin tersebut kembali turun sebanyak 399 jiwa dengan jumlah penduduk miskin 344,230 jiwa. Pasca Covid 19, jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 370,670 atau naik sebanyak 2.644 jiwa. Sementara pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin tersebut kembali turun menjadi 335,210 jiwa atau turun sebanyak 3.546 jiwa dan pada tahun 2023 naik mengalami kenaikan 516 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 340,370 jiwa.

Grafik 2.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat tahun 2018-2023

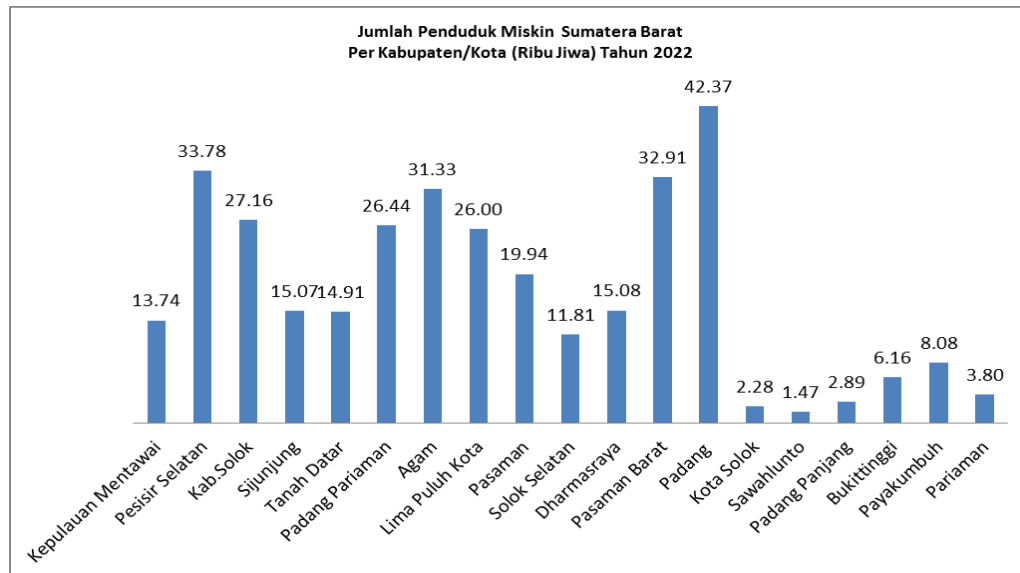


Sumber : BPS Sumbar

Berdasarkan angka kemiskinan absolut atau jumlah penduduk miskin, terdapat 5 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kantong kemiskinan di Sumatera Barat. Jumlah penduduk miskin yang paling banyak berada di Kota Padang dengan jumlah sekitar 42,370 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 33,780

jiwa, Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah 32,910 jiwa, Kabupaten Agam dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 31,330 jiwa, dan Kabupaten Solok dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 27,106 jiwa.

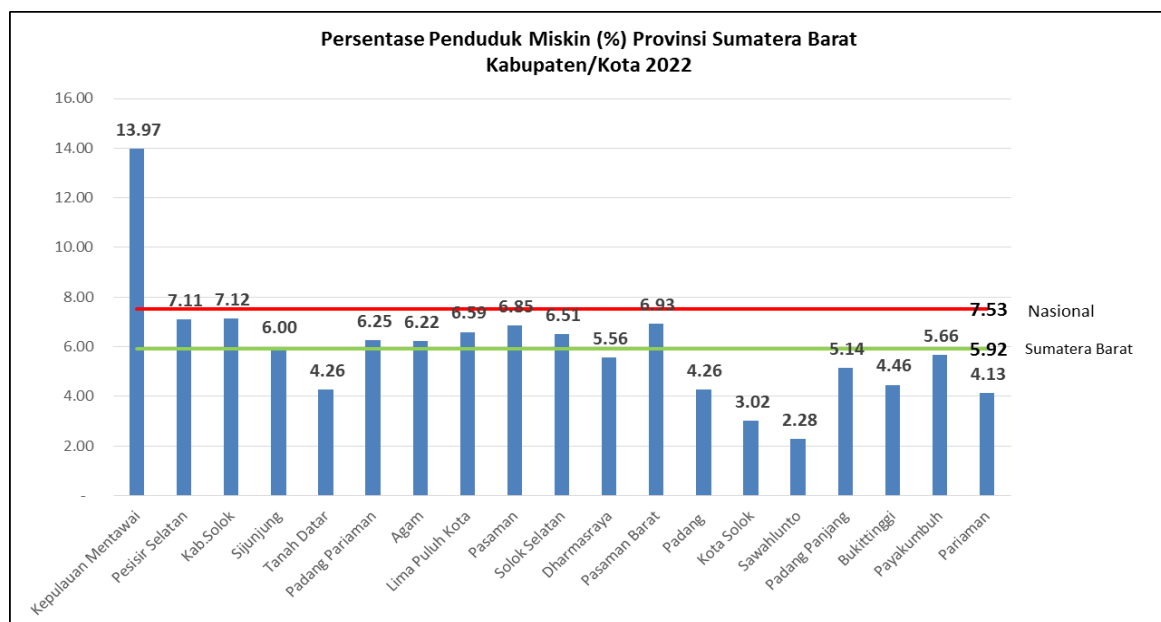
Grafik 2.5
Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat (Ribuan Jiwa) Per kabupaten/Kota tahun 2022



Sumber : BPS

Sementara berdasarkan persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin yang paling besar berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan persentase kemiskinan 13,97 persen. Sedangkan Kabupaten/kota dengan persentase jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kota Sawahlunto sebesar 2,28 persen.

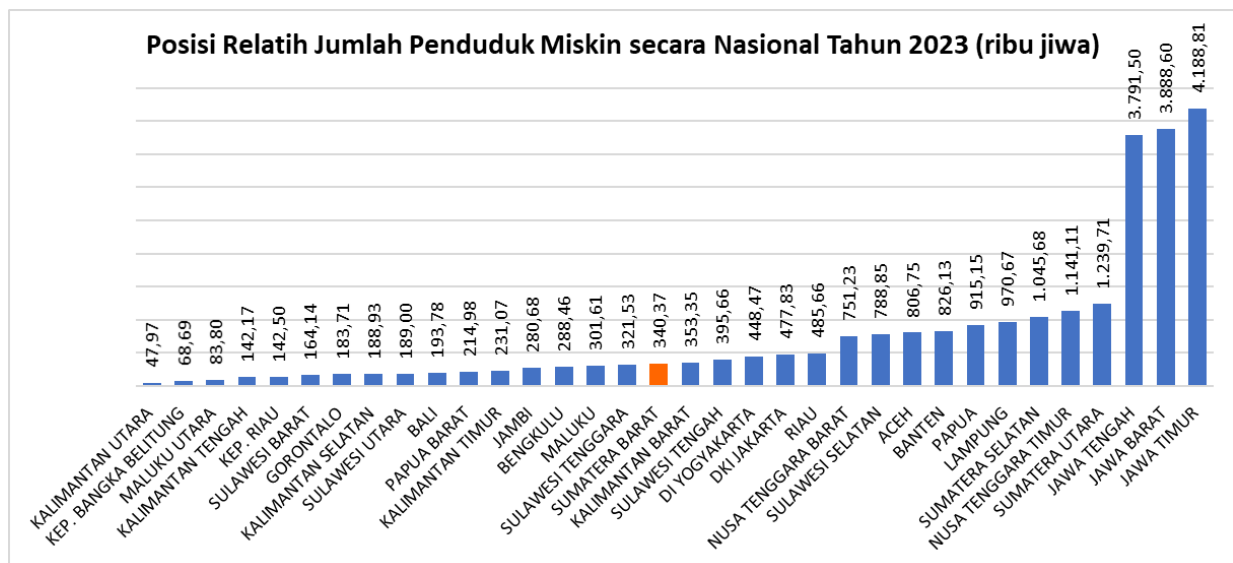
Grafik 2.6
Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat Per kabupaten/Kota tahun 2022



Sumber : BPS Sumbar

Berdasarkan konsep kemiskinan sebelumnya, maka jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk (orang) pada suatu daerah dan waktu tertentu yang kondisi taraf hidupnya dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Secara nasional, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 2023 berada pada angka 340,370 jiwa dan berada pada posisi 17 diantara provinsi di Indonesia sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.7
Analisis Identifikasi Jumlah Penduduk Miskin Nasional Tahun 2023



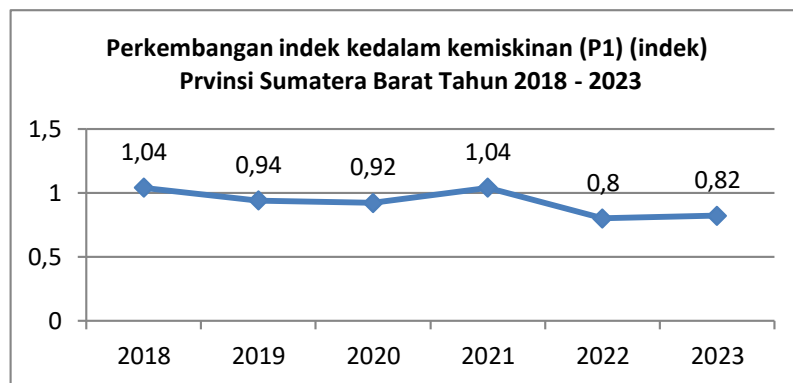
Sumber : data diolah dari BPS

2.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tetapi lebih dari itu yang terpenting adalah bagaimana mengatasi kedalaman kemiskinan Sumatera Barat. Kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Secara umum perkembangan kedalaman kemiskinan Sumatera Barat menunjukkan tren yang semakin menurun dengan fluktuasi kenaikan terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2018 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Sumatera Barat sebesar 1,04 poin dan turun menjadi 0,94 pada tahun 2019 atau turun sebesar 0,10. Kondisi tersebut kembali turun pada tahun 2020 sebesar 0,02 menjadi 0,92. Pada tahun 2021 sebesar 1,04 atau naik sebesar 0,12 dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 0,80 atau turun sebesar 0,24. Sementara pada tahun 2023 tingkat kedalaman kemiskinan berada pada angka 0,82 atau naik sebesar 0,02.

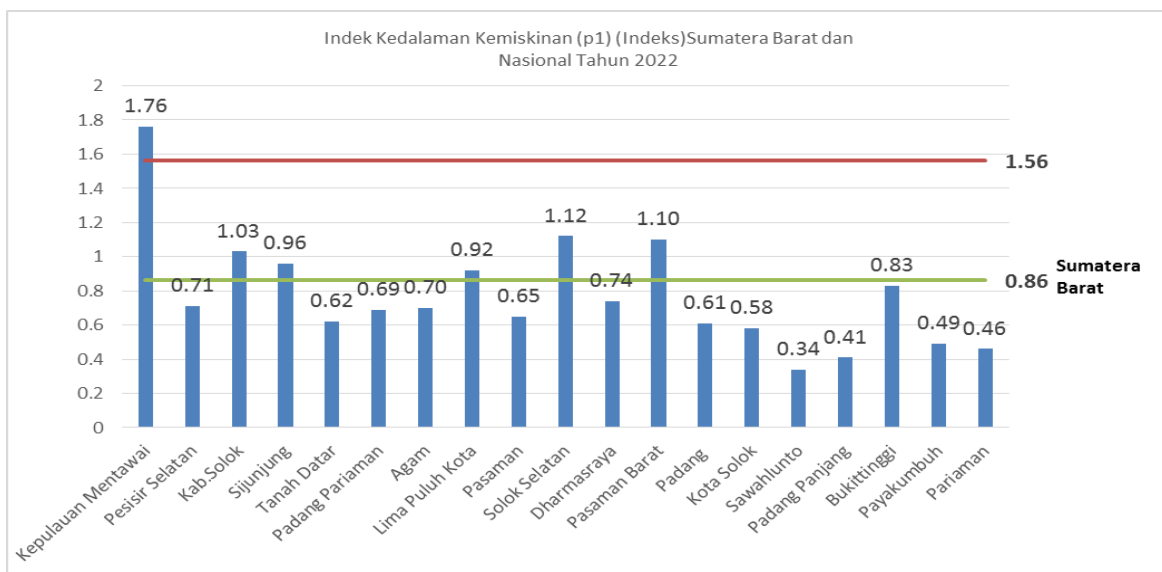
Grafik 2.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Sumbar

Pada Tahun 2022 Tingkat kedalaman kemiskinan Sumatera Barat lebih rendah dari capaian Nasional, yaitu 0,86 sedangkan tingkat Kedalaman kemiskinan (P1) Nasional sebesar 1,56. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan nasional lebih tinggi dari Sumatera Barat.

Grafik 2.9
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Sumatera Barat dan Nasional

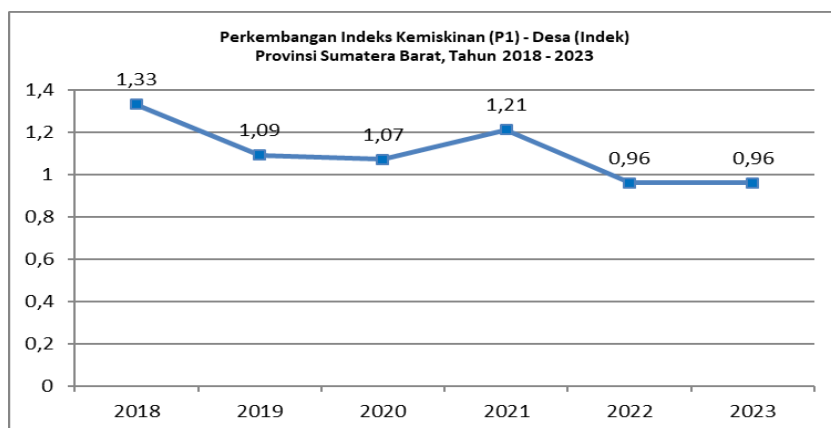


Sumber : BPS

Tahun 2018 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Perdesaan Sumatera Barat sebesar 1,33 dan pada Tahun 2019 sebesar 1,09 turun sekitar 0.24. pada Tahun 2020 tingkat kedalaman kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 1,07 turun 0,02 dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 tingkat kedalaman kemiskinan perdesaan sumatera Barat 1,21 naik sekitar 0,14 dari tahun 2020. Pada tahun 2022 tingkat kedalaman kemiskinan perdesaan Sumatera Barat sebesar 0,96 turun sekitar 0,25 dari tahun 2021, dan pada tahun 2023 tingkat kedalaman kemiskinan perdesaan

Sumatera Barat 0,96 tingkat ini sama dengan tahun 2022. Berdasarkan perkembangan diatas, secara umum dapat dilihat bahwa tingkat kedalaman kemiskinan perdesaan Sumatera Barat dari Tahun 2018 sampai Tahun 2023 memiliki tren yang menurun.

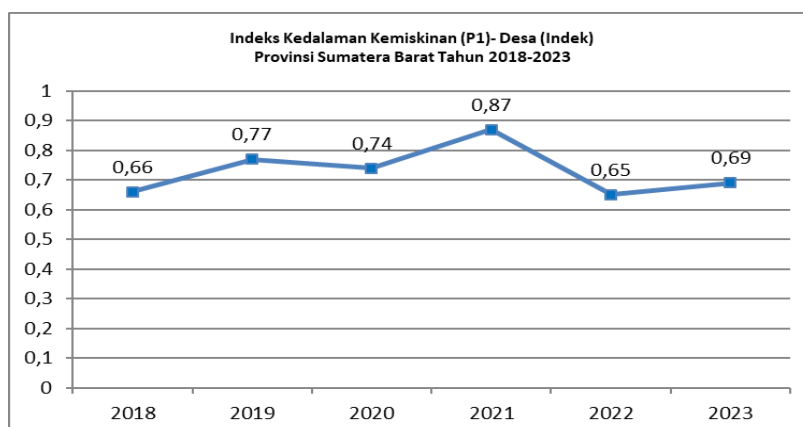
Grafik 2.10
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Desa Sumatera Barat – Kab/kota tahun 2018-2023



Sumber : BPS

Sementara untuk tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan Sumatera Barat cenderung berfluktuasi dengan tren yang sedikit meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 0,03 poin. Pada tahun 2018 tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,66 dan pada tahun 2019 sebesar 0,77 atau naik 0,11. Kondisi tersebut pada tahun 2020 turun sekitar 0,03 menjadi 0,74. Sementara pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,13 menjadi 0,87 dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 0,65 atau turun sebesar 0,22. Sementara pada tahun 2023 tingkat kemiskinan perkotaan Sumatera Barat adalah 0,69 atau naik sebesar 0,04 dibandingkan dengan tahun 2022.

Grafik 2.11
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan Sumatera Barat – Kab/kota tahun 2018-2023



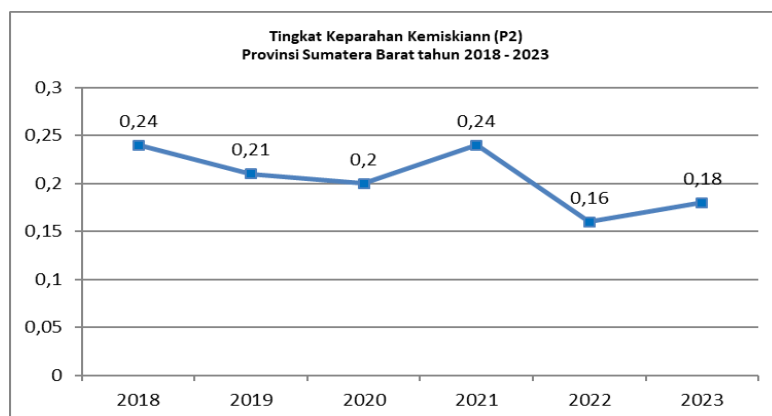
Sumber : BPS

2.1.4 Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

Tingkat keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan

pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Secara umum, perkembangan tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat dari tahun 2018 sampai 2023 mengalami penurunan 0,07 poin. Pada tahun 2018 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,24 dan mengalami penurunan sebesar 0,03 pada tahun 2019 menjadi 0,21 dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi 0,20. Sementara pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 0,04 menjadi 0,24 dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 0,16 turun atau 0,08 dari tahun 2021. Pada tahun 2023 kondisi tersebut naik sebesar 0,02 menjadi 0,18 dibandingkan dengan tahun 2022.

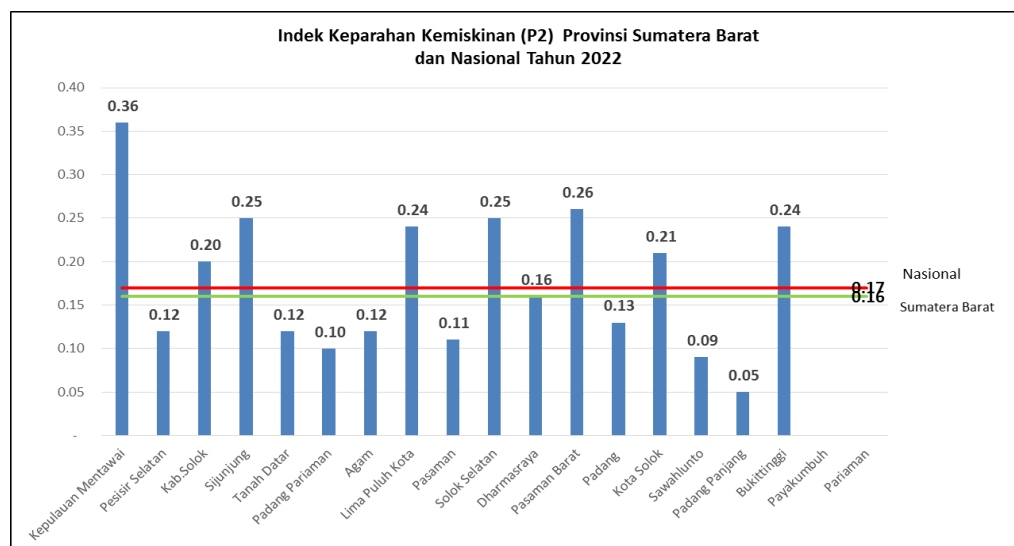
Grafik 2.12
Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023



Sumber : BPS

Secara nasional, tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat pada Tahun 2022 lebih rendah dari capaian Nasional, yaitu 0,16 sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (P2) Nasional sebesar 0,17.

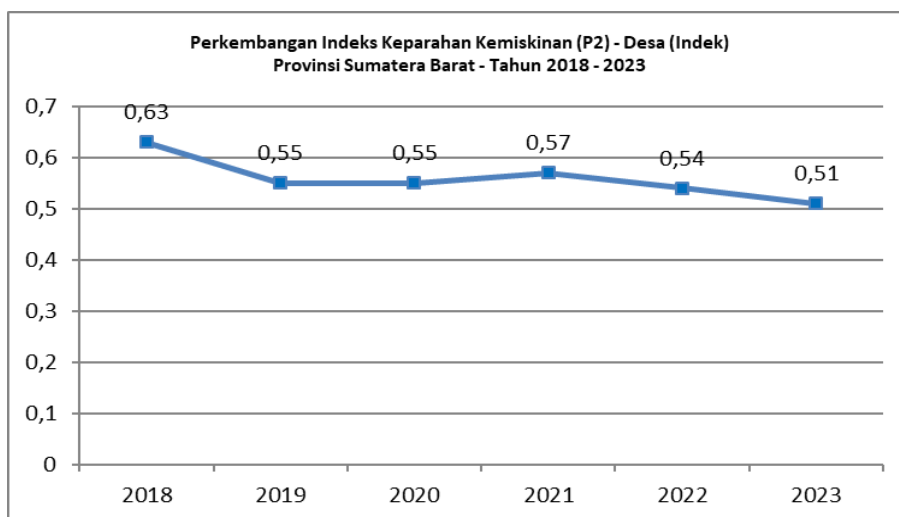
Grafik 2.13
Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2022



Sumber : BPS

Pada Tahun 2018 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 0,63 dan pada Tahun 2019 sebesar 0,55, turun sebesar 0,08. Pada Tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 0,55 sama dibandingkan dengan Tahun 2019. Pada Tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 0,57 naik sebesar 0,02 dibandingkan dengan Tahun 2020. Pada Tahun 2022 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 0,54 turun sekitar 0,03 dan pada Tahun 2023 sebesar 0,51 turun sebesar 0,04 dibandingkan dengan Tahun 2022. Jika dilihat dari Tahun 2018 sampai 2023 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat turun sebesar 0,12

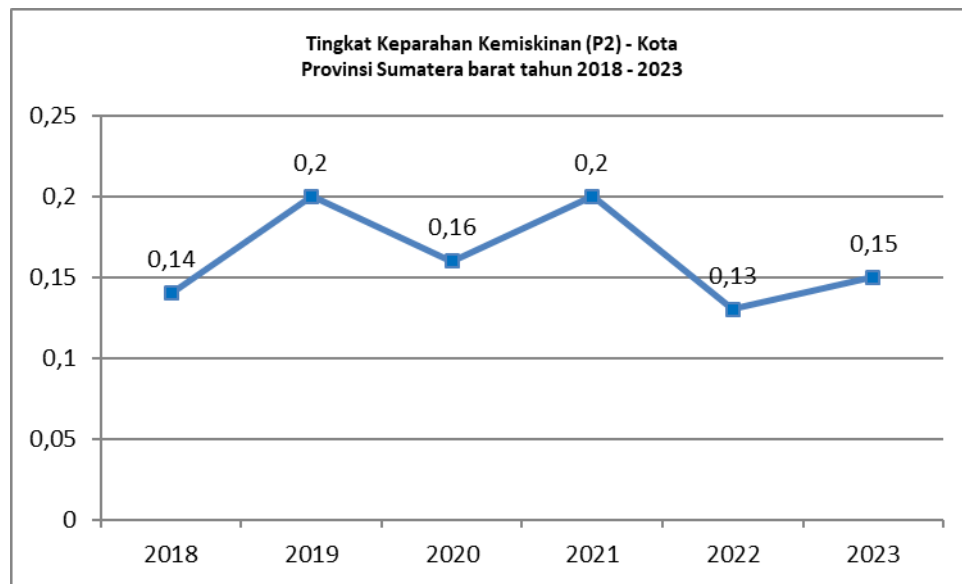
Grafik 2.14
Tingkat Keparahkan Kemiskinan (P2) - Desa Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023



Sumber : BPS

Pada Tahun 2018 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,14 dan pada Tahun 2019 sebesar 0,20 naik sekitar 0,06. Pada Tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,16 turun sekitar 0,04 dibandingkan dengan Tahun 2019. Pada Tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat 0,20 naik 0,04 dibandingkan Tahun 2020. Pada Tahun 2022 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,13 turun sekitar 0,07 dibandingkan Tahun 2021, dan pada Tahun 2023 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,15 naik sekitar 0,02 dibandingkan dengan Tahun 2022. . Jika dilihat dari Tahun 2018 sampai 2023 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat naik sebesar 0,01.

Grafik 2.15
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023



Sumber : BPS

2.2 Hasil Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan

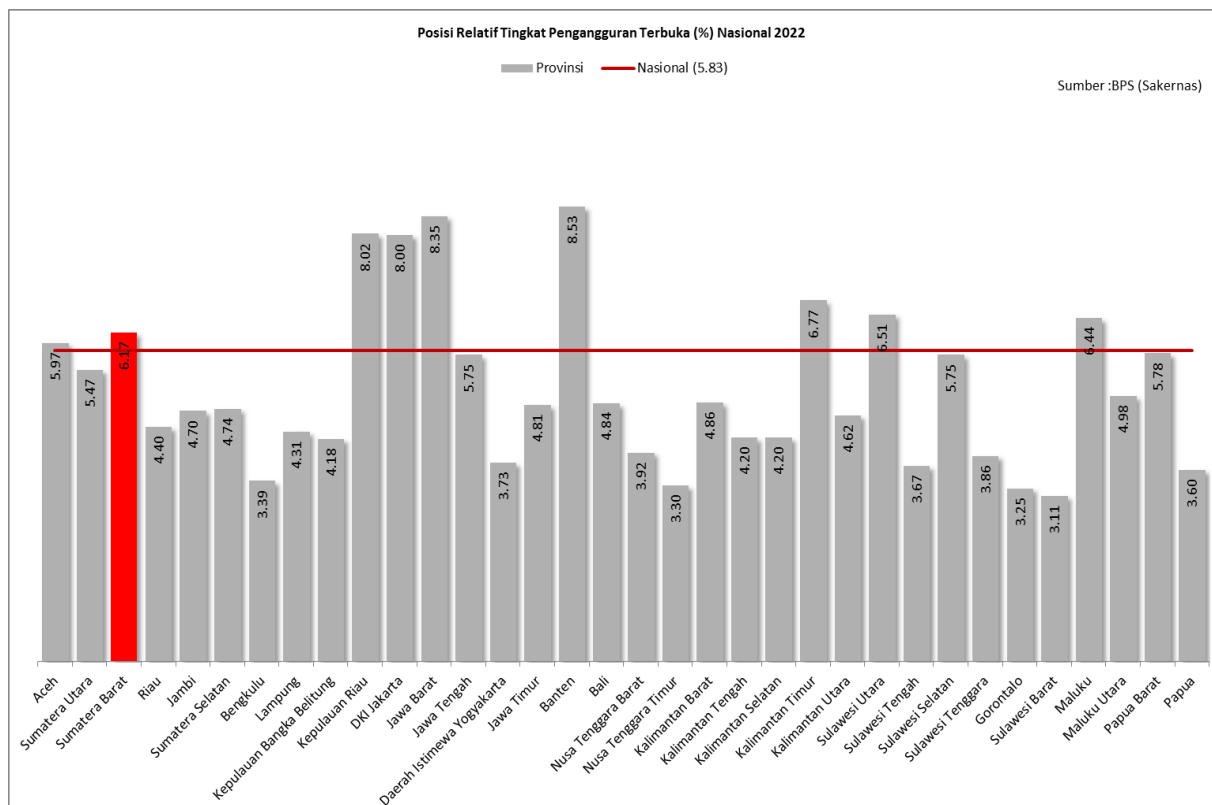
2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Bidang ketenagakerjaan menjadi program prioritas pembangunan Gubernur Sumatera Barat yang merupakan bentuk komitmen kepada rakyat. Program prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam visi Gubernur Sumatera Barat yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan dimana ketenagakerjaan mendapatkan perhatian yang utama dari Gubernur Sumatera Barat, karena ketenagakerjaan merupakan penyumbang terbesar keberhasilan pembangunan. Disisi lain ketenagakerjaan juga merupakan salah satu penyebab penghambat pembangunan, yakni dengan munculnya permasalahan sosial di bidang ketenagakerjaan. Permasalahan sosial yang timbul dari bidang ketenagakerjaan adalah semakin banyaknya pengangguran. Segala bentuk pengangguran inilah menyumbang angka kemiskinan di Sumatera Barat. Pengangguran adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja sama sekali. Pengangguran merupakan salah satu indikator dalam bidang ketenagakerjaan, terutama pengangguran terbuka. Pengangguran Terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Beberapa kategori yang termasuk dalam pengangguran terbuka adalah tidak punya pekerjaan dan yang mencari pekerjaan, tidak punya pekerjaan dan yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan

persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin rendah peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong timbulnya permasalahan sosial.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 sebesar 6,17 %. Capaian ini menunjukkan TPT Sumatera Barat lebih tinggi sekitar 0,34 % dibandingkan dengan capaian TPT Nasional yang sebesar 5,83 %.

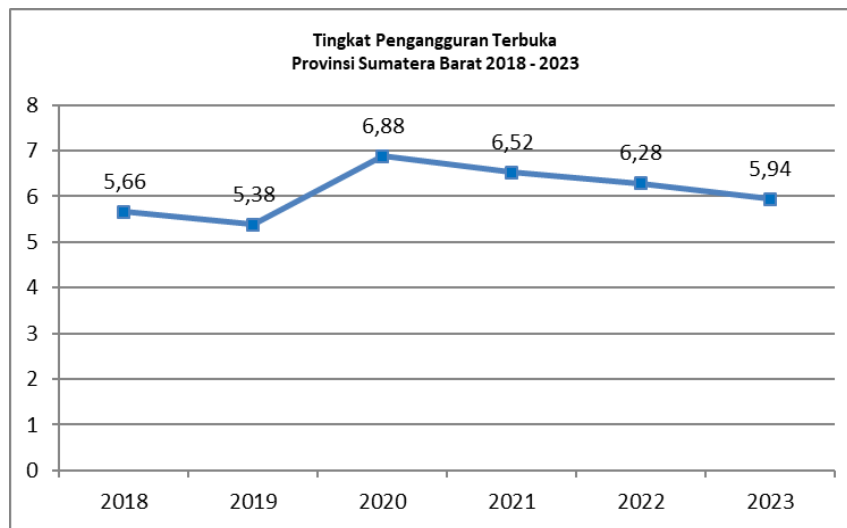
Grafik 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022



Sumber : BPS

Secara time series atau dari periode 2018-2023 Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat berfluktuasi, dimana pada Tahun 2018 sebesar 5,66 persen, Tahun 2019 turun menjadi 5,38 persen, Tahun 2020 naik menjadi 6,88, pada Tahun 2021 turun menjadi 6,52, Tahun 2022 naik menjadi 6,28 dan pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,94 persen secara periode dari Tahun 2018 sampai Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat sebesar naik 0,28 persen.

Grafik 2.17
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023



Sumber : BPS

Seiring dengan beberapa kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran, pada Tahun 2018 persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,66 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu berada di titik 5,38 persen. Namun pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sekitar 1.50 persen dari titik 5,38 persen pada tahun 2019 menjadi 6,88 persen pada tahun 2020. Berfluktuasi nya persentase tingkat pengangguran terbuka Sumatera Barat karena adanya program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengurangi jumlah pengangguran yang tepat. Namun pada Tahun 2020 di masa adanya Pandemi Covid 19 dan pemerintah membuat suatu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar maka berdampak juga pada sektor ketenagakerjaan dengan adanya PHK Buruh dan pengurangan jam kerja sehingga menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi naik.

2.3 Hasil Evaluasi Bidang Kesehatan

Upaya untuk menjaga kesehatan dapat dilakukan melalui upaya promotif dan preventif, dalam rangka mengurangi tindakan kuratif. Itu sebabnya pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan pembangunan bidang kesehatan tidak saja secara fisik (sarana dan prasarana kesehatan) tetapi juga peningkatan kualitas layanan kesehatan. Pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan profesional terus dilakukan agar penyediaan layanan kesehatan tidak hanya terfokus pada wilayah dengan infrastruktur yang sudah baik saja. Indikator kesehatan dapat menunjukkan sejauh mana upaya-upaya kesehatan yang telah dilakukan membawa pengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Beberapa indikator yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam bidang kesehatan, dapat digunakan untuk melihat gambaran derajat kesehatan penduduk di Sumatera Barat. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan apakah suatu negara, dalam tataran lebih luas atau provinsi dan kabupaten/kota dalam tataran daerah memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang baik atau tidak. Indikator yang umum dipakai adalah : Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), dan lain-lain.

2.3.1 Umur Harapan Hidup

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat tercermin dari Angka usia harapan hidup penduduk (UHH). Keberhasilan pembangunan disuatu daerah salah satunya dapat diukur dari keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup masyarakat juga menjadi cerminan keberhasilan bidang kesehatan. Untuk itulah UHH selalu menjadi salah satu indikator untuk menilai keberhasilan itu. Setiap Tahun semua daerah mengumumkan Human Development Indeks/Indeks Pembangunan Manusia. Umur harapan Hidup merupakan salah satu komponen dari IPM, Umur Harapan Hidup masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan IPM suatu daerah akan naik, dan ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah.

2.4 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan

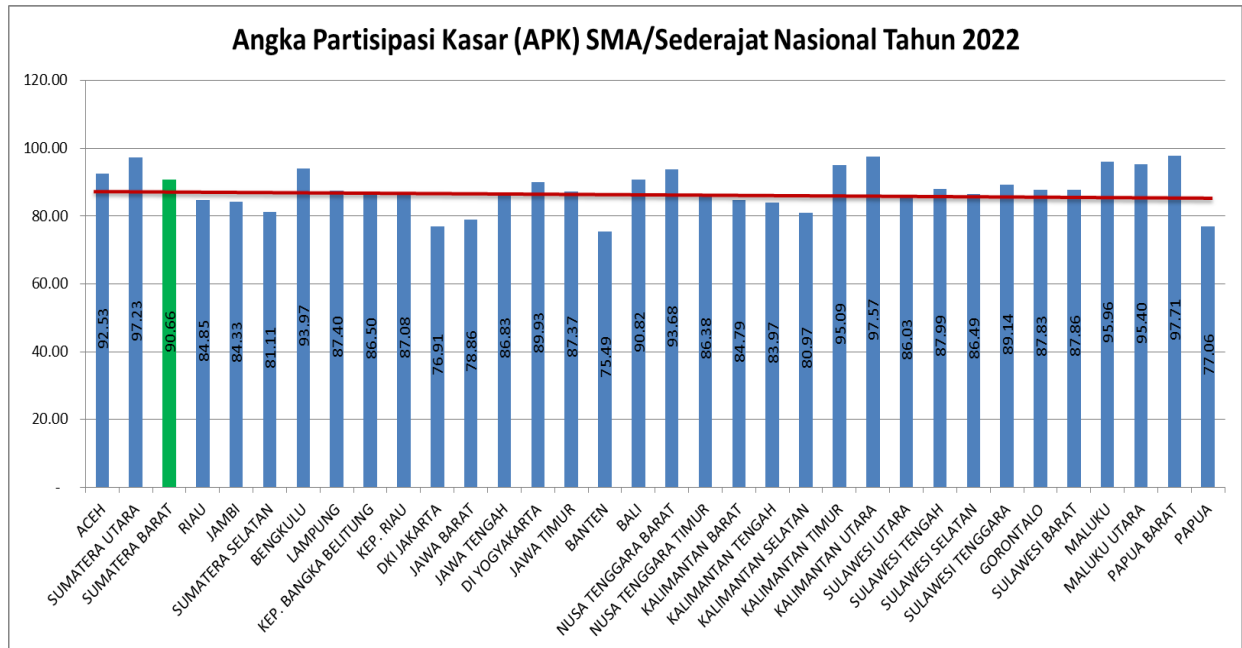
2.4.1 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah murid pada tingkat pendidikan SLTA dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

2.4.1.1 Posisi Relatif

Pada Tahun 2022 APK SMA/MA Provinsi Sumatera Barat sebesar 90,66%, capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional yaitu 85,49%. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Provinsi Sumatera Barat peringkat 4 dari 10 provinsi di Sumatera. Dan menduduki posisi ke 11 dari 34 Provinsi.

Grafik 2.18
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 2022

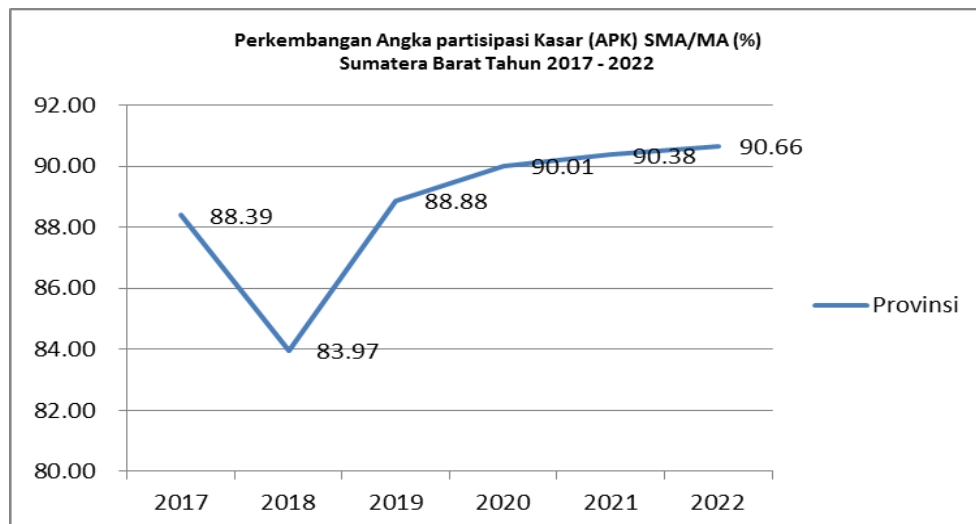


Sumber : BPS

2.4.1.2 Perkembangan Antar Waktu

Berdasarkan Grafik 2.18 secara time series APK SMA/MA tahun 2017-2022 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 APK SMA/MA Sumatera Barat 88,39 persen, dan turun pada tahun 2018 menjadi 83,97 persen. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 88,88 persen, pada tahun 2020 naik menjadi 90,01 persen. namun Kembali mengalami kenaikan menjadi 90,38 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 90,66 persen. Dilihat dari periode tahun 2017 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,27 persen.

Grafik 2.19
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2022

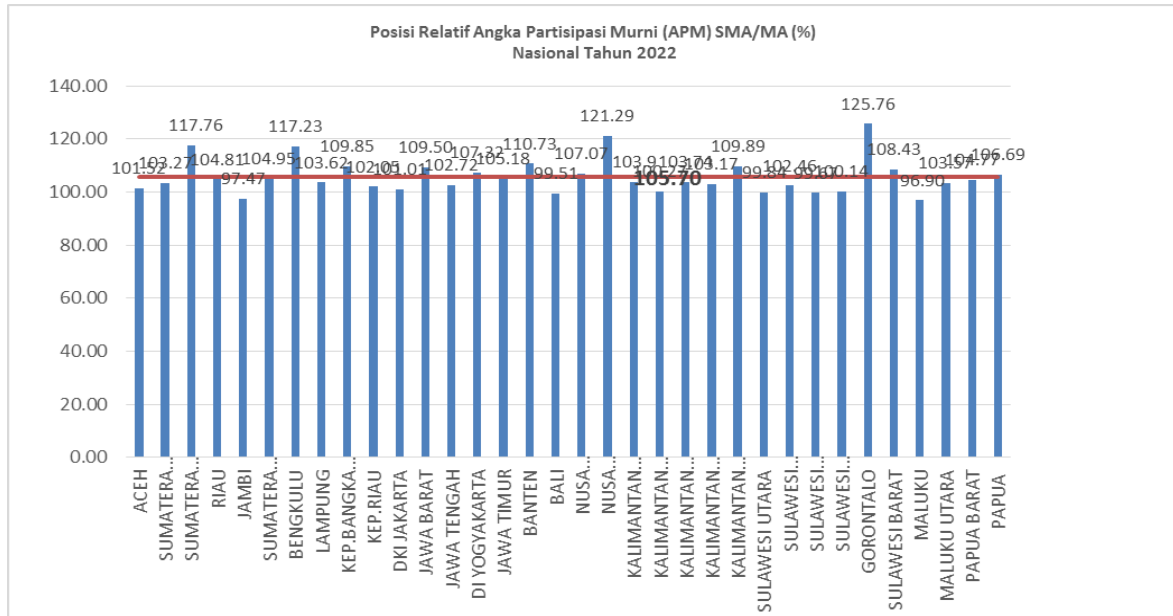


Sumber : BPS

2.4.2 Angka Partisipasi Murni SMA/MA

Angka Partisipasi Murni SMA/MA adalah perbandingan penduduk menurut usia pendidikan yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan yang bersesuaian usia 16-18 tahun di SLTA, dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun untuk SLTA.

Grafik 2.20
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2022

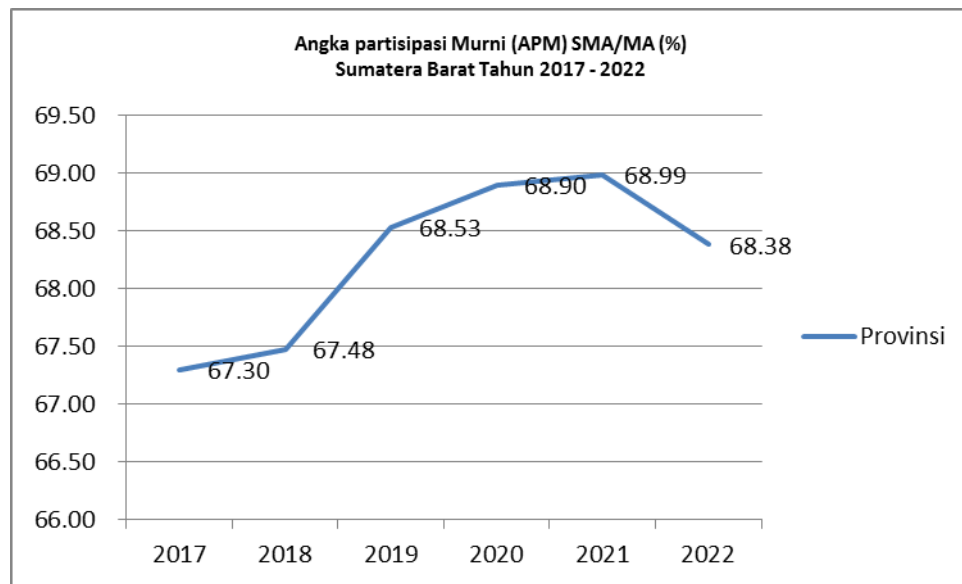


Sumber : BPS

Pada Tahun 2022 capaian APM SMA/MA Provinsi Sumatera Barat sebesar 117,76 persen lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional sebesar 105,70 persen. Dibandingkan dengan provinsi lain Angka Partisipasi Murni SMA/MA Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 secara Nasional. Dan jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera, capaian APM SMA/MA Sumatera Barat ini tertinggi Ke-3 setelah Provinsi Nusatenggara Timur dan Gorontalo. Secara Nasional capaian APM SMA/MA tahun 2022 tertinggi diduduki oleh Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 125,76 persen. Sedangkan Provinsi dengan capaian APM SMA/MA terendah tahun 2022 adalah Provinsi Maluku sebesar 96,90 persen.

Berdasarkan Grafik 2.20 Perkembangan APM SMA/MA Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2022, pada tahun 2017 APM SMA/MA Provinsi Sumatera Barat sebesar 67,30 persen, tahun 2018 sebesar 67,48 persen, naik 0,18 point. Pada tahun 2019 naik menjadi 68,53, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi menjadi 68,90 persen. Pada tahun 2021 naik menjadi 68,99 persen dan pada tahun 2022 turun menjadi 68,28 persen. Jika dilihat dari tahun 2017 sampai 2022 perkembangan APM SMA/MA Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 1,08 persen

Grafik 2.21
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017- 2022



Sumber : BPS

2.5 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar

Ketersediaan prasarana dan sarana infrastruktur dasar dapat mempengaruhi kualitas kehidupan warga terutama dengan kualitas kesehatan. Prasarana dan sarana infrastruktur yang buruk berpotensi menyebabkan berbagai macam penyakit.

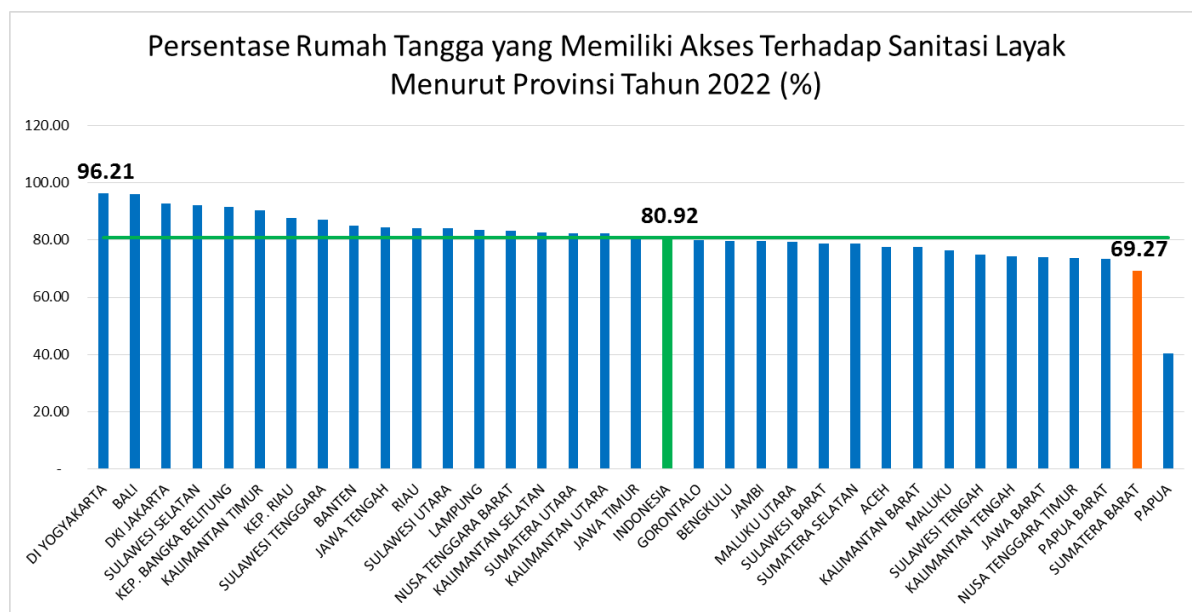
2.5.1 Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak (%)

Sanitasi layak yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (septic tank) atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Untuk daerah perdesaan, dikatakan memiliki akses sanitasi layak, jika kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja ke lubang tanah dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Konsep sanitasi layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. (BPS).

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septic atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika di wilayah perdesaan.

Grafik 2.22
Proporsi Rumah tangga dengan Sanitasi layak (%) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2022



Sumber : BPS

Berdasarkan grafik posisi relatif persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak capaian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 sebesar 69.27 persen dan dibawah dari capaian nasional sebesar 80,92 persen. Dibandingkan dengan provinsi lain, posisi Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan 34 dari 35 Provinsi di Indonesia. Untuk posisi Provinsi Sumatera Barat bila dibandingkan dengan Provinsi lain di pulau Sumatera, kondisi Sumatera Barat yang rendah dari 10 Provinsi. Provinsi yang memiliki proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 96,21 persen, kemudian Provinsi Bali sebesar 95,94 persen, sedangkan persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak yang paling rendah adalah Provinsi Papua sebesar 40,34 persen.

Analisis Posisi Relatif

Dalam skala nasional, Tahun 2022 posisi Sumatera Barat terkait akses sanitasi layak masih dibawah rata-rata nasional yakni sebesar 69,27 persen. Bahkan skala regionalpun, posisi Sumatera Barat berada di peringkat terbawah dari 9 propinsi di Sumatera.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dalam kurun waktu tahun 2017-2022, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Sumatera Barat terus mengalami perkembangan positif. Tahun 2017 Proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi Layak sebesar 55,04 persen meningkat terus sampai dengan tahun 2021 menjadi sebesar 68,68 persen. Tahun 2022 menjadi sebesar 69,27.

Analisis Efektivitas

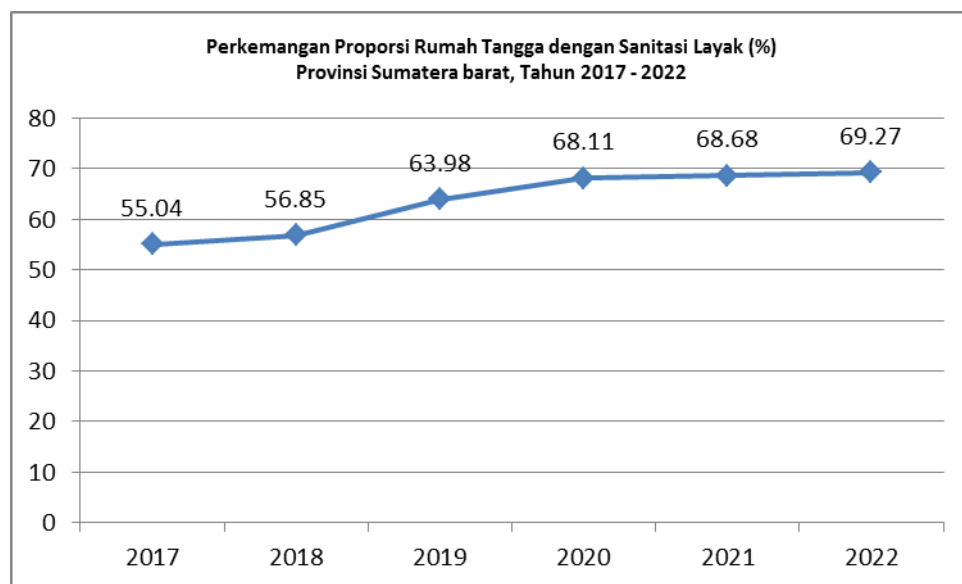
Berbagai strategi dan pendekatan selama lima tahun terakhir sudah mulai menunjukkan efektivitas yang semakin membaik untuk menaikkan persentase rumah bersanitasi layak. Sejak tahun 2017 sejumlah 55,04 persen hingga tahun 2021 menjadi 68,68 persen. Tahun 2022 menjadi 69,27 persen

Analisis Relevansi

Dibandingkan perkembangan nasional, strategi yang dijalankan oleh provinsi Sumatera Barat sudah relevan dengan kenaikan persentase Nasional namun masih dibawah rata-rata nasional.

Grafik 2.23

Proporsi Rumah tangga dengan Sanitasi layak (%) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2022



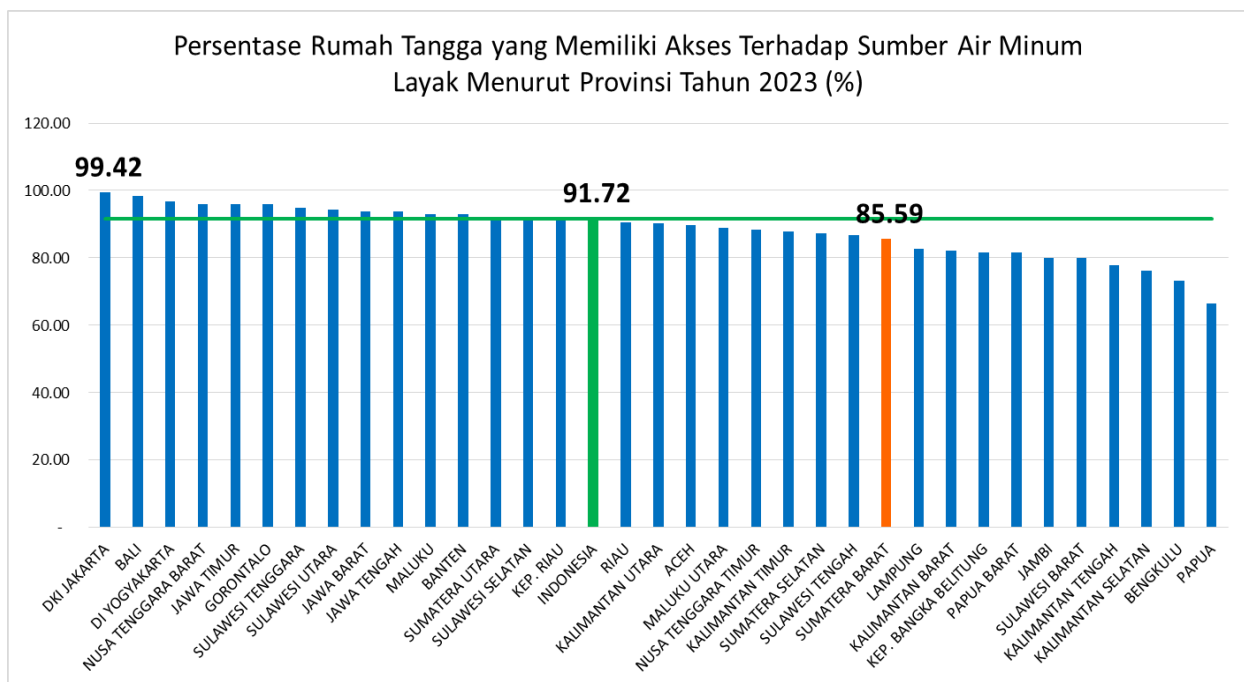
Sumber : BPS

Berdasarkan grafik Perkembangan antar waktu persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak capaian Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan untuk menentukan program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan, sehingga pada periode antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 persentase rumah tangga dengan sanitasi layak meningkat.

2.5.2 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak mengacu konsep terbaru tahun 2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Merujuk pada konsep ini sumber air minum layak jika sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Konsep air minum layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

Grafik 2.24
Proporsi Rumah tangga dengan Air Minum layak (%) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2023



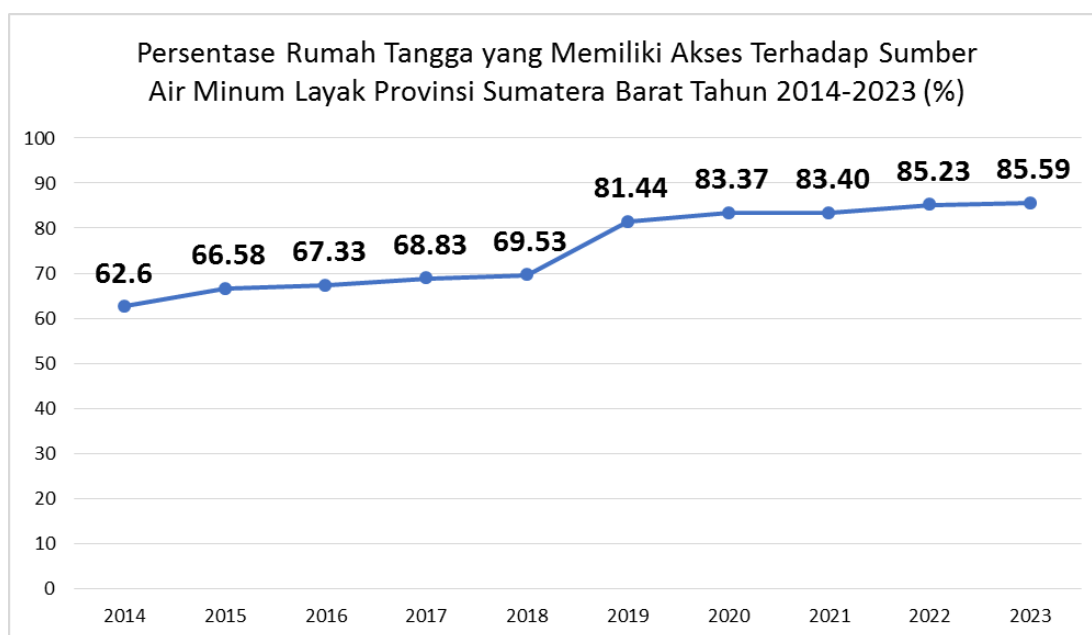
Sumber : BPS

Berdasarkan grafik Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Akses terhadap Sumber Air Minum Layak (%) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 2023 menunjukkan capaian Provinsi Sumatera Barat sebesar 85,59 % yang masih dibawah capaian tingkat nasional sebesar 91,72 %. Dibandingkan dengan 35 provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke 25. Bila dibandingkan dengan 35 provinsi di Indonesia, sedangkan provinsi yang ada di bawah Provinsi Sumatera Barat ada Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, Kep Bangka Belitung, Papua Barat, Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan selatan,

Bengkulu, Papua. Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%) yang paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,42 %, sedangkan yang paling rendah capainnya adalah Provinsi Bengkulu Papua sebesar 66,49 %.

Pada Grafik Perkembangan antar waktu persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Sumatera Barat data yang tersedia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa perkembangan antar waktu persentase rumah tangga dengan air minum layak baik Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2018 Persentase rumah tangga dengan air minum layak sebesar 80,50 %, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 81,44 %. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 83,37 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 83,40 persen Pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 persentase Rumah Tangga dengan air minum layak Provinsi Sumatera Barat naik secara beruntun. Tahun 2018 sampai 2019 naik sebesar 0,94 persen, mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 1,37 persen dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen, Pada tahun 2022 naik sebesar 1,83 persen naik menjadi 85.23. Pada Tahun 2023 naik sebesar 0,36 Persen menjadi 85.59. kenaikan ini sangat sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini tentunya akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melanjutkan kebijakan yang sudah ada dan membuat program yang baru di masa yang akan datang.

Grafik 2.25
Proporsi Rumah tangga dengan air minum layak (%) Provinsi Sumatera Barat
tahun 2014 – 2023



Sumber : BPS

Analisis Posisi Relatif

Posisi Sumatera Barat untuk akses air minum layak sebesar 85.59 persen masih di bawah rata-rata nasional sebesar 91,72 persen. Untuk skala regional Sumatera Propinsi Sumatera Barat berada di posisi ke 6 di atas propinsi Sumatera Selatan. Provinsi tertinggi untuk akses air minum layak adalah DKI Jakarta sebesar 99,42 persen dan Provinsi terendah yaitu Papua sebesar 66,49 persen

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dari tahun 2018-2021, perkembangan antar waktu capaian akses air minum layak di propinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana sejak tahun 2018-2018 mengalami kenaikan dari 80,50 persen pada tahun 2018 menjadi 83,40 persen pada tahun 2021 tahun 2022 naik menjadi 85.23 persen tahun 2023 naik menjadi 85.59 persen

Analisis Efektivitas

Berbagai strategi dan pendekatan capaian akses air minum layak selama lima tahun terakhir sudah mulai menunjukkan efektivitas yang semakin membaik untuk menaikkan persentase rumah bersanitasi layak. Sejak tahun 2018 sejumlah 80,50 persen hingga tahun 2021 menjadi 83,40 persen tahun 2022 naik menjadi 85.23 persen tahun 2023 naik menjadi 85.59 persen

Analisis Relevansi

Pencapaian penanganan akses air minum layak di propinsi Sumatera Barat sudah relevan dengan capaian penanganan nasional. Pada tahun 2023, kenaikan akses air minum layak nasional mencapai 91,72 persen sedangkan provinsi Sumatera Barat mencapai 85,59. Dibandingkan perkembangan nasional, strategi yang dijalankan oleh propinsi Sumatera Barat sudah relevan dengan kenaikan persentase Nasional namun masih dibawah rata-rata nasional

2.6 Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Non Konsumsi

Secara umum penyebab kemiskinan di Indonesia, selain disebabkan oleh tidak terpenuhinya konsumsi kebutuhan dasar, juga berkaitan erat dengan tidak meratanya akses terhadap ketersediaan lapangan kerja dan kewirausahaan, pendidikan dan kesehatan, tidak memadainya infrastruktur (prasarana) dasar, rentannya kecukupan pangan, serta rendahnya kemampuan keuangan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan dan mengalokasikan pendapatan tersebut untuk merealisasikan program dan kegiatan (intervensi kebijakan) penanggulangan kemiskinan

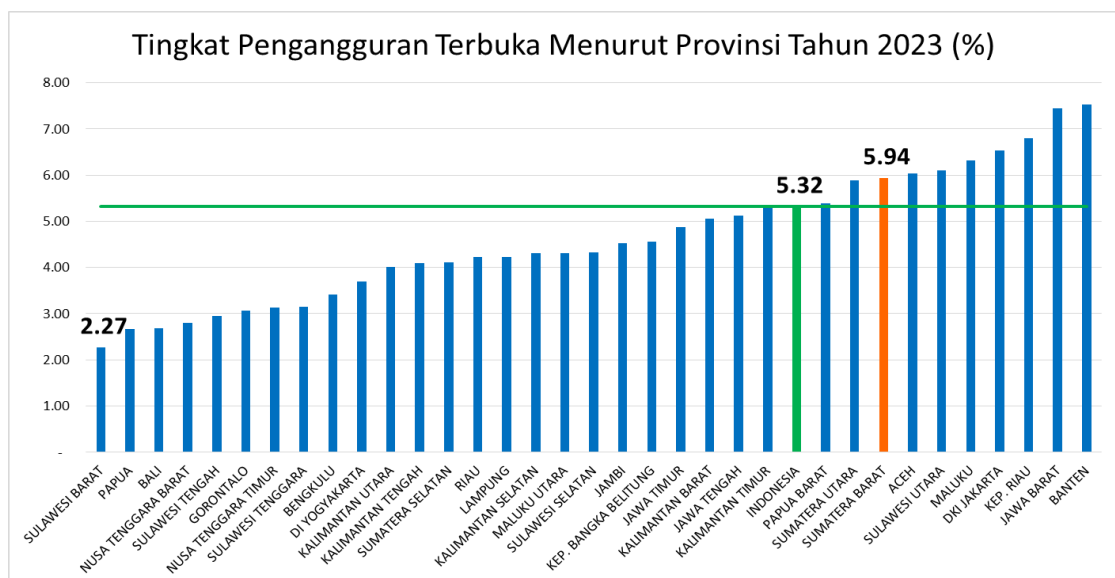
2.6.1. Bidang Ketenagakerjaan

Beberapa indikator yang dibahas dalam mengidentifikasi permasalahan ketenagakerjaan ada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Sementara TPAK sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Simanjuntak, 2005).

2.6.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Hasil analisis masalah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Gambar 2.26

Grafik 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi



Sumber : diolah dari data BPS

Posisi Relatif

Gambar 2.26 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat pada Tahun 2023 sedikit diatas angka TPT nasional yaitu sebesar 5,94% sedangkan TPT Nasional sebesar 5,32%. Provinsi Sumatera Barat termasuk 10 besar tertinggi Angka TPT nya (nomor 8 tertinggi secara Nasional) setelah Aceh (6,03), Sumatera utara (5,89%), Maluku (6,31), DKI Jakarta (6,80%), Kep. Riau (6,80%), Jawa Barat (7,74), dan Banten (7.52%) yang berada diatas rata-rata Nasional.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan dimensi kemiskinan bidang ketenagakerjaan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama kurun waktu tahun terakhir 2016-2021 tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. TPT terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 5,09%, namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,88% dan pada tahun ini angka tertinggi Tingkat Pengangguran Terbuka untuk Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka menurun lagi di angka 6,52%, tetapi masih diatas rata-rata nasional sebesar 6,49%. Pada Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Sumatera Barat terbuka Sumatera barat sebesar 5,94 tetapi masih diatas rata rata nasional sebesar 5,32%

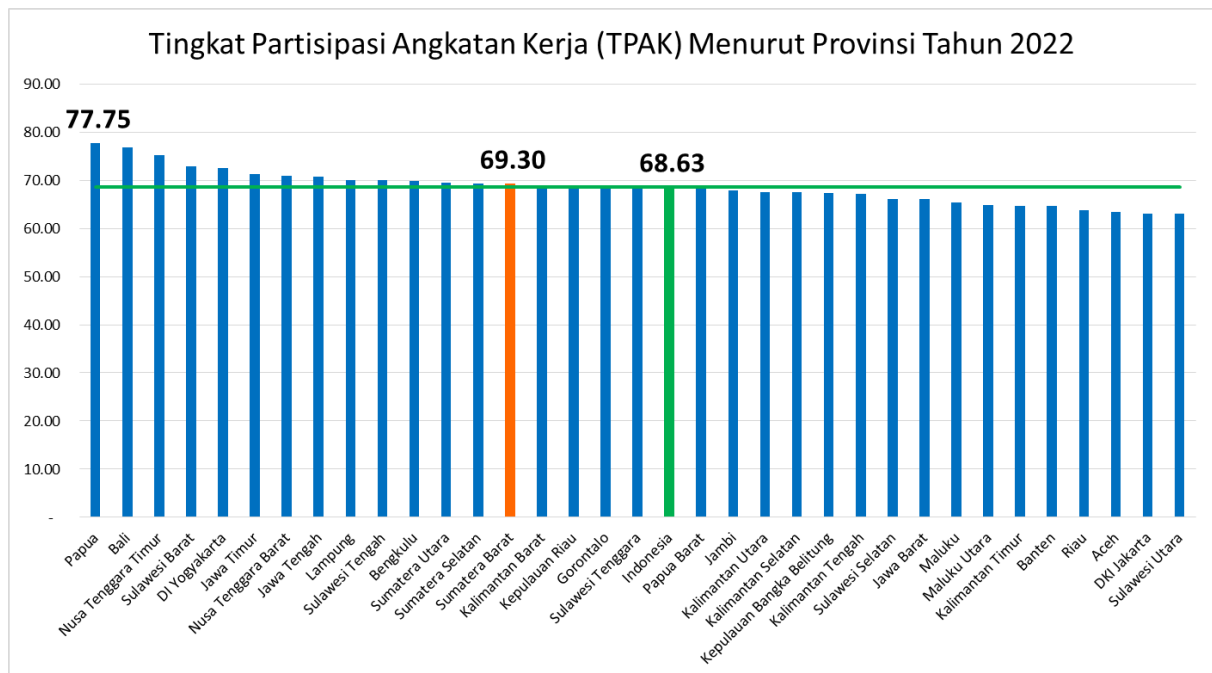
Analisis Efektivitas

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. TPT terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 5,09%, namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,88%. Peningkatan yang terjadi ditahun 2020 dampak dari Pandemi Covid-19. Capaian tersebut menunjukan bahwa penanganan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat melalui penyediaan lapangan kerja masih belum efektif dan berdampak besar pada serapan tenaga kerja yang terjadi. Pada Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Sumatera Barat terbuka Sumatera barat sebesar 5,94 tetapi masih diatas rata rata nasional sebesar 5,32%

Analisis Relevansi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Barat Selama kurun waktu 2016-2021, berdasarkan analisis relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Barat Selama kurun tahun tersebut, secara umum menunjukkan perkembangan yang baik, namun belum optimal, dimana pada tahun 2016 sebesar 5,09 persen meningkat menjadi 6,52 persen pada Tahun 2021, dari garis *trendline* di atas menggambarkan adanya relevansi dengan tingkat pengangguran secara Nasional kurun waktu 2016-2021 yang perkembangannya sejalan. Pada Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Sumatera Barat terbuka Sumatera Barat sebesar 5,94 tetapi masih diatas rata rata nasional sebesar 5,32%.

Grafik 2.27
Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi Tahun 2022



Sumber : diolah dari data BPS

Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.15 menunjukkan bahwa TPAK Sumatera Barat lebih tinggi dibanding TPAK nasional, dan jika dibandingkan dengan provinsi lain TPAK Sumatera Barat masuk kategori tinggi. Pada tahun 2022 TPAK Sumatera Barat sebesar 69,30% dan TPAK Nasional sebesar 68,63%. TPAK tertinggi ada pada daerah Provinsi Papua sebesar 77,75% dan TPAK terendah ada pada daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan angka sebesar 63,08%. Dilihat dari posisi relatif ini, angka TPAK Provinsi seluruh Indonesia tidak ada angka yang terlalu ekstrim karena secara rata-rata mendekati angka Nasional.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan Antar Waktu tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 (67,08%), namun kembali menurun tajam di tahun 2017 (66,29%) dan adalah yang terendah dalam periode tersebut. TPAK Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 naik turun setiap tahunnya dan meningkat tajam pada tahun 2020 yaitu sebesar 69,01% dan kemudian turun lagi pada tahun hingga tahun 2021 sebesar 67,72 persen. Tahun 2022 TPAK Sumatera Barat naik menjadi 69,30%.

Analisis Efektivitas

Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 (67,08%), namun kembali menurun tajam di tahun 2017 (66,29%) dan adalah yang terendah dalam periode tersebut. TPAK Provinsi Sumatera Barat tahun 2016- 2021 naik turun setiap tahunnya dan hingga tahun 2020 sebesar 69,01persen dan menurun lagi pada tahun 2021 sebesar 67,72%. Pada tahun 2022 TPAK Sumatera Barat 69,30% diatas sekikit dari nasional sebesar 68,63 persen. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan belum cukup efektif dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat.

Kesimpulan TPT dan TPAK

1. Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat tergolong tinggi dibanding nasional dan regional. Hal ini didukung oleh tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi baik dibanding nasional maupun provinsi lain, kecuali Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara dan Bali.
2. Dari sisi perkembangan antar waktu, baik Sumatera Barat dan nasional terjadi peningkatan pengangguran terbuka pada tahun 2022. Perubahan tingkat pengangguran terbuka nasional lebih tinggi dibanding Sumatera Barat.
3. Peningkatan pengangguran terbuka juga diikuti oleh penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari 67,08 persen tahun 2016 menjadi 68,63 persen tahun 2022.

2.6.1.2. Kesempatan Kerja

Tabel 2. 28 berikut menampilkan penduduk bekerja dan TKK menurut kelompok umur dan jenis kelamin Dapat dilihat bahwa TKK cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, secara umum TKK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TKK laki-laki yaitu sebesar 93,96 persen berbanding 94,20 persen. Penduduk perempuan yang memiliki TKK paling rendah adalah penduduk pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebesar 82,67 persen. Sedangkan untuk laki-laki, TKK terendah terdapat pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu sebesar 85,34 persen. Pada rentang tersebut, sepertinya akan lebih sulit bagi mereka untuk menggantikan posisi penduduk lain yang sudah bekerja pada saat ini dibandingkan pada kelompok umur yang lebih tinggi. Sedangkan penduduk pada kelompok umur berikutnya mulai terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Gambar 2.28
Penduduk Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Pekerja	TKK (Persen)	Pekerja	TKK (Persen)	Pekerja	TKK (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15 - 19	68.283	85,34	40.477	94,45	108.760	88,52
20 - 24	164.549	86,38	123.616	82,67	288.165	84,75
25 - 34	408.624	91,31	249.667	92,45	658.291	91,74
35 - 44	383.245	96,63	269.212	93,92	652.457	95,49
45 - 54	308.440	97,48	252.672	96,46	561.112	97,02
55 - 64	204.815	99,06	162.573	99,86	367.388	99,41
65 +	108.407	98,63	77.963	99,99	186.370	99,20
Total	1.646.363	94,20	1.176.180	93,96	2.822.543	94,10

Sumber: Sakernas, Februari 2023

2.6.1.3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin

Jika dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tabel 2.29 menunjukkan bahwa baik TKK laki-laki maupun TKK perempuan memperlihatkan pola yang sama, yaitu tinggi pada kelompok penduduk berpendidikan rendah (tidak punya ijazah SD bersekolah dan tidak/belum tamat SD), dan kemudian menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan pasar kerja untuk tenaga kerja tidak terdidik (informal) lebih banyak tersedia dibandingkan dengan tenaga kerja terdidik (formal).

Tabel 2.29
Penduduk Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Pekerja	TKK (Persen)	Pekerja	TKK (Persen)	Pekerja	TKK (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Punya ijazah SD	197.241	96,81	148.702	96,78	345.943	96,80
SD/Sederajat	354.110	96,78	187.189	94,59	541.299	96,01
SMP/Sederajat	309.584	94,73	186.738	91,89	496.322	93,64
SM Umum/ Sederajat	378.603	93,12	258.755	95,10	637.358	93,91
SM Kejuruan	216.592	89,23	94.765	88,41	311.357	88,98
Diploma I/II/ III/Akademi	31.891	86,86	75.305	97,11	107.196	93,82
Universitas/ D IV/S1/S2/S3	158.342	95,82	224.726	93,56	383.068	94,48
Jumlah	1.646.363	94,20	1.176.180	93,96	2.822.543	94,10

Sumber: Sakernas, Februari 2023

Terlihat pada tabel 4.2, TTK tertinggi untuk tenaga kerja laki-laki adalah tenaga kerja dengan status tidak punya ijazah SD yaitu 96,81 persen. Kemudian untuk tenaga kerja perempuan, TTK pada tenaga kerja yang tidak memiliki ijazah SD juga cukup tinggi yaitu sebesar 96,78 persen. Namun, TTK tertinggi tenaga kerja perempuan berada pada pendidikan tertinggi Diploma I/ II/III/Akademi yang mencapai 97,11 persen.

2.6.2. Bidang Kesehatan

2.6.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

Angka kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Secara nasional, target penurunan angka kematian bayi dalam RPJMN tahun 2024 adalah sebesar 16/1000 kelahiran, sedangkan target global pada tahun 2030 AKB sebesar 12/1000 kelahiran.

2.6.2.2. Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

Angka kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka ini merefleksikan tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Secara nasional, target penurunan angka kematian BALITA dalam RPJMN tahun 2024 adalah sebesar 16/1000 kelahiran, sedangkan target global pada tahun 2030 AKB sebesar 12/1000 kelahiran.

2.6.2.3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

2.6.2.4. Balita Pendek dan Sangat Pendek (%)

Balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study) tahun 2006. Dalam RPJMN 2020-2024, target penurunan angka stunting adalah 14%

2.6.2.5. Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk)

Rasio bidan menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga bidan per 100.000 penduduk.

2.6.2.6. Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)

Rasio dokter per 100.000 penduduk adalah perbandingan ketersediaan tenaga dokter untuk 100.000 jiwa penduduk. Sesuai dengan Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/II/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit, terutama dengan mengacu pada metode perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan pendekatan rasio terhadap nilai telah ditetapkan target ketersediaan tenaga dokter per 100.000 penduduk hingga tahun 2025 sebanyak 112 orang.

2.6.2.7. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain. Semakin tinggi presentase penduduk dengan keluhan kesehatan menunjukkan buruknya derajat kesehatan penduduk tersebut.

2.6.2.8. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)

Pengobatan sendiri atau sering disebut swamedikasi adalah upaya pengobatan atau perawatan diri sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyakit yang umum diderita, dengan menggunakan obat bebas maupun obat bebas terbatas atau obat wajib apotek yang didapat tanpa resep dokter dan diserahkan oleh apoteker di apotek berdasarkan keterangan obat yang ada di brosur sesuai dengan penyakitnya (Izzatin, 2015).

2.6.2.9. Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan adalah proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga tidak terlatih/tidak terampil.

2.6.2.10. Angka Morbiditas (%)

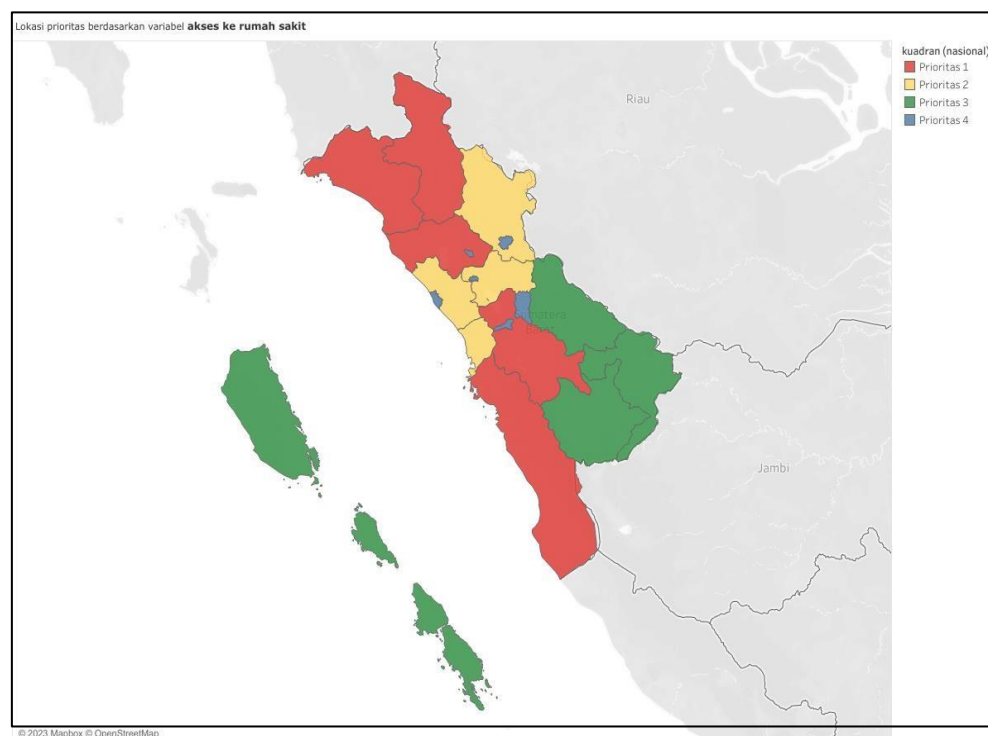
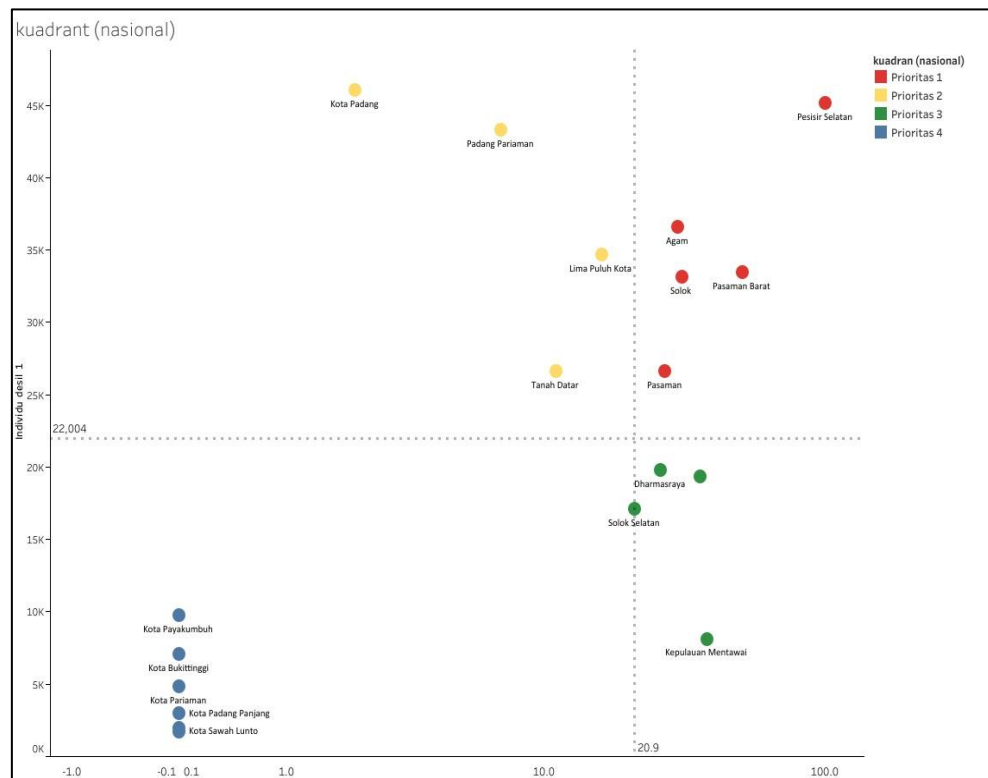
Angka Morbiditas merupakan angka yang menunjukkan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat (BPS). Semakin tinggi morbiditas, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin buruk.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN BERJALAN

3.1 Penentuan Lokasi Prioritas

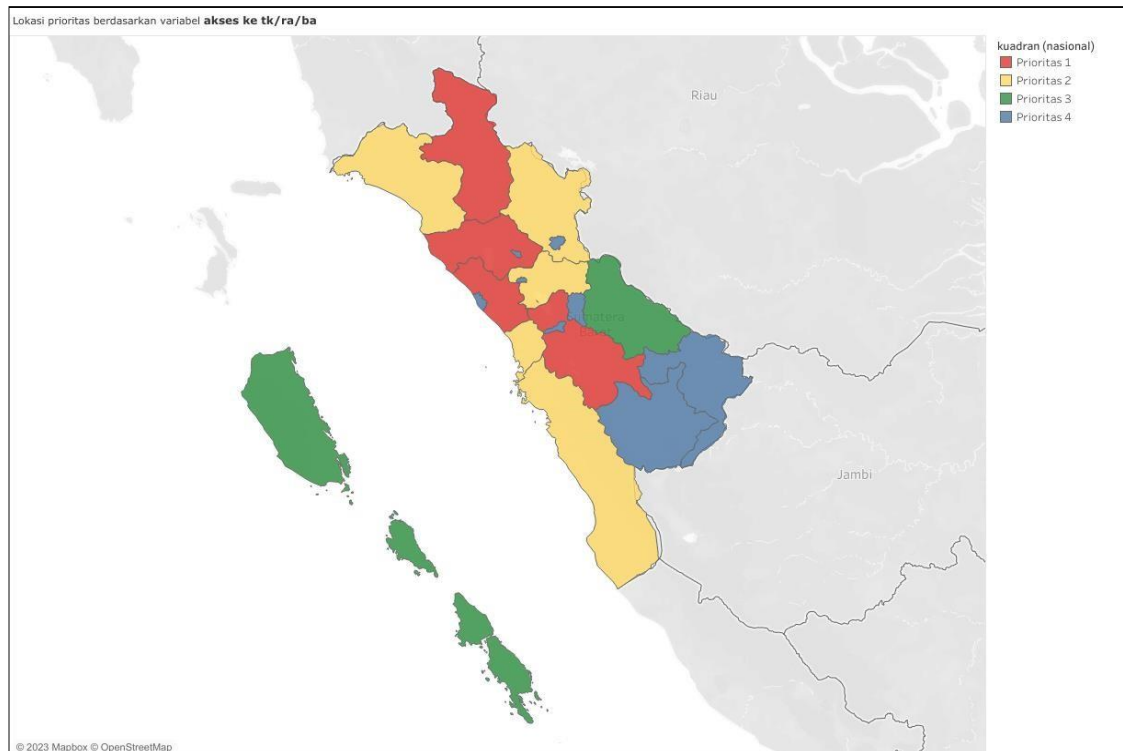
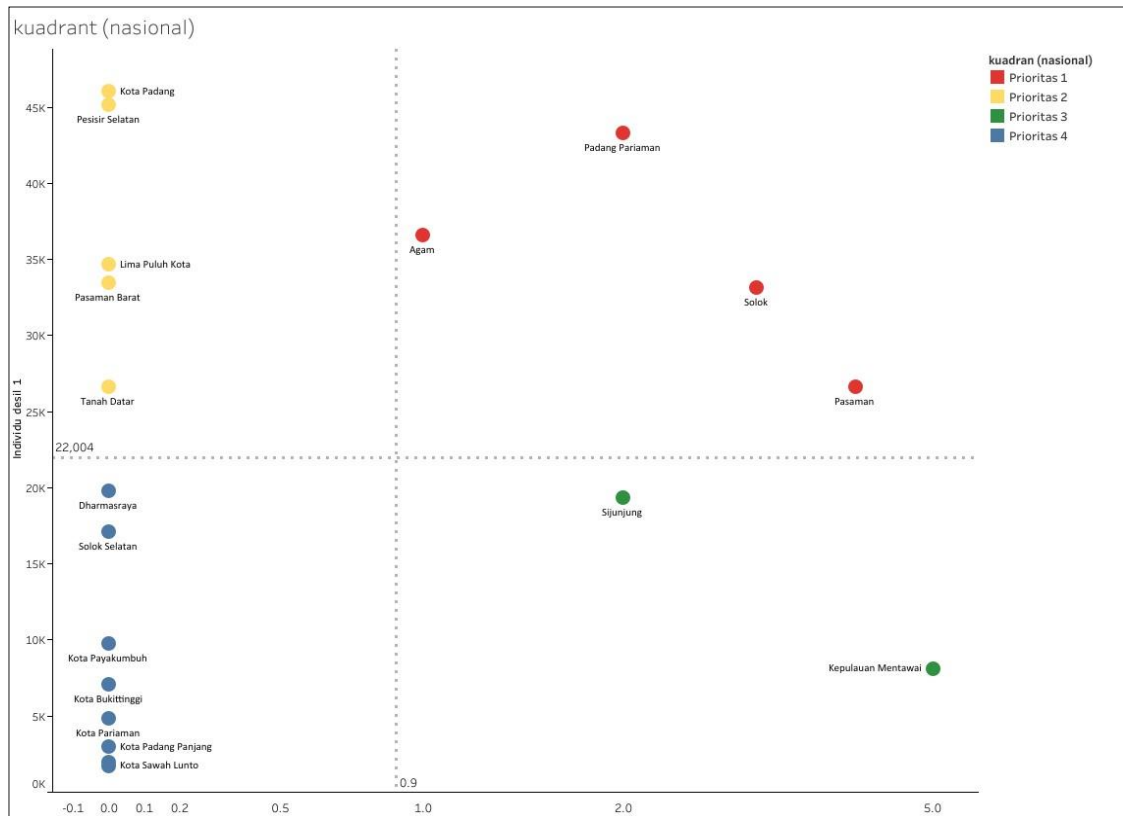
a. Penentuan Lokasi Prioritas Berdasarkan Variabel Akses ke Rumah Sakit



Sebaran Lokasi Prioritas Berdasarkan Variabel Akses ke Rumah Sakit

Sebaran Desil 1 di Sumatera Barat				
kodekab_..	Kabupaten	keluarga desil 1	individu desil 1	kuadran (nasional)
1302	Pesisir Selatan	8,841	45,157	Prioritas 1
1303	Solok	6,277	33,128	Prioritas 1
1307	Agam	6,720	36,607	Prioritas 1
1309	Pasaman	4,841	26,612	Prioritas 1
1312	Pasaman Barat	5,822	33,474	Prioritas 1
1305	Tanah Datar	4,871	26,598	Prioritas 2
1306	Padang Pariaman	7,492	43,292	Prioritas 2
1308	Lima Puluh Kota	7,207	34,653	Prioritas 2
1371	Kota Padang	8,780	46,025	Prioritas 2
1301	Kepulauan Mentawai	1,374	8,113	Prioritas 3
1304	Sijunjung	3,974	19,299	Prioritas 3
1310	Solok Selatan	3,468	17,060	Prioritas 3
1311	Dharmasraya	4,053	19,744	Prioritas 3
1372	Kota Solok	359	1,958	Prioritas 4
1373	Kota Sawah Lunto	297	1,711	Prioritas 4
1374	Kota Padang Panjang	593	2,971	Prioritas 4
1375	Kota Bukittinggi	1,426	7,065	Prioritas 4
1376	Kota Payakumbuh	2,033	9,765	Prioritas 4
1377	Kota Pariaman	844	4,836	Prioritas 4

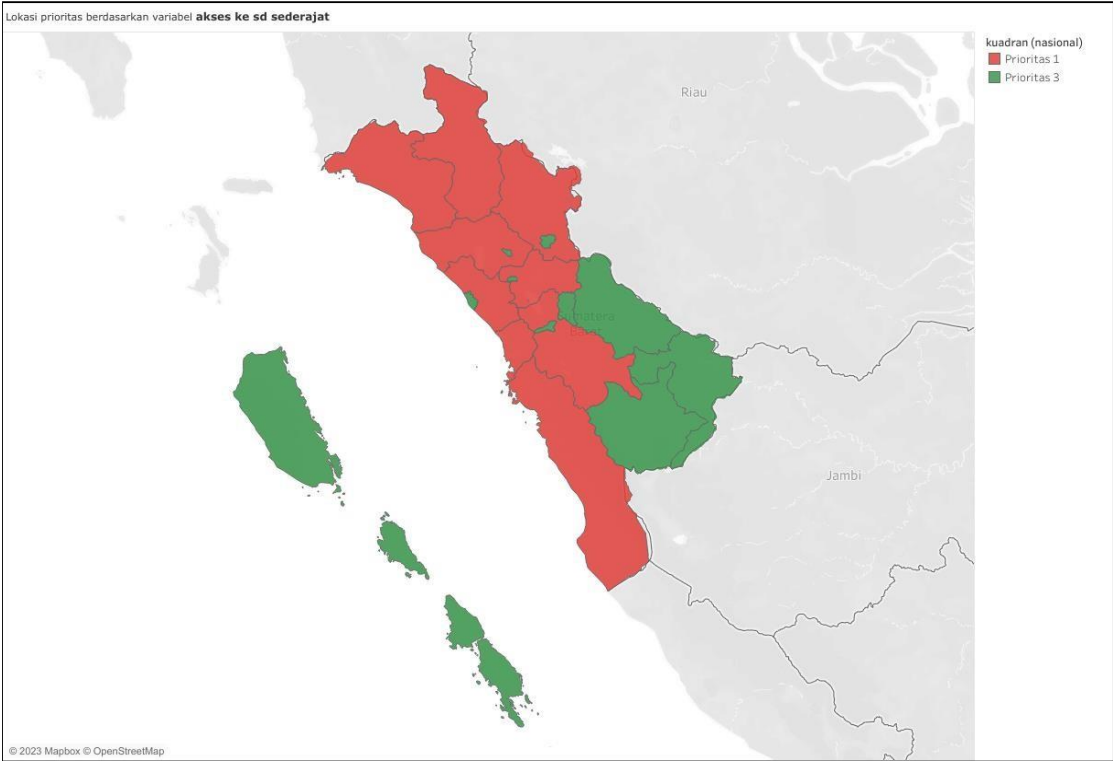
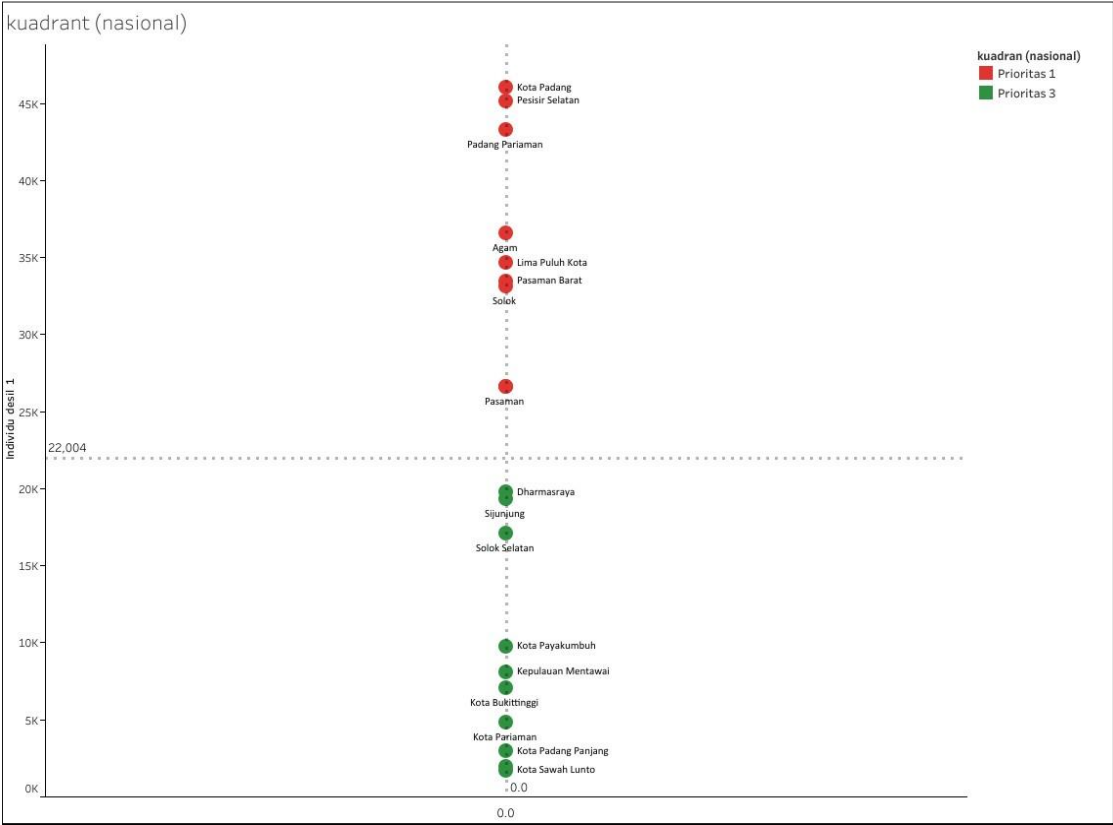
b. Penentuan Lokasi Prioritas Berdasarkan Variabel Akses ke TK/RA/BA



Sebaran Lokasi Prioritas Berdasarkan Variabel Akses ke TK/RA/BA

Sebaran Desil 1 di Sumatera Barat				kuadran (nasional)
kodekab_..	Kabupaten	keluarga desil 1	individu desil 1	
1303	Solok	6,277	33,128	Prioritas 1
1306	Padang Pariaman	7,492	43,292	Prioritas 1
1307	Agam	6,720	36,607	Prioritas 1
1309	Pasaman	4,841	26,612	Prioritas 1
1302	Pesisir Selatan	8,841	45,157	Prioritas 2
1305	Tanah Datar	4,871	26,598	Prioritas 2
1308	Lima Puluh Kota	7,207	34,653	Prioritas 2
1312	Pasaman Barat	5,822	33,474	Prioritas 2
1371	Kota Padang	8,780	46,025	Prioritas 2
1301	Kepulauan Mentawai	1,374	8,113	Prioritas 3
1304	Sijunjung	3,974	19,299	Prioritas 3
1310	Solok Selatan	3,468	17,060	Prioritas 4
1311	Dharmasraya	4,053	19,744	Prioritas 4
1372	Kota Solok	359	1,958	Prioritas 4
1373	Kota Sawah Lunto	297	1,711	Prioritas 4
1374	Kota Padang Panjang	593	2,971	Prioritas 4
1375	Kota Bukittinggi	1,426	7,065	Prioritas 4
1376	Kota Payakumbuh	2,033	9,765	Prioritas 4
1377	Kota Pariaman	844	4,836	Prioritas 4

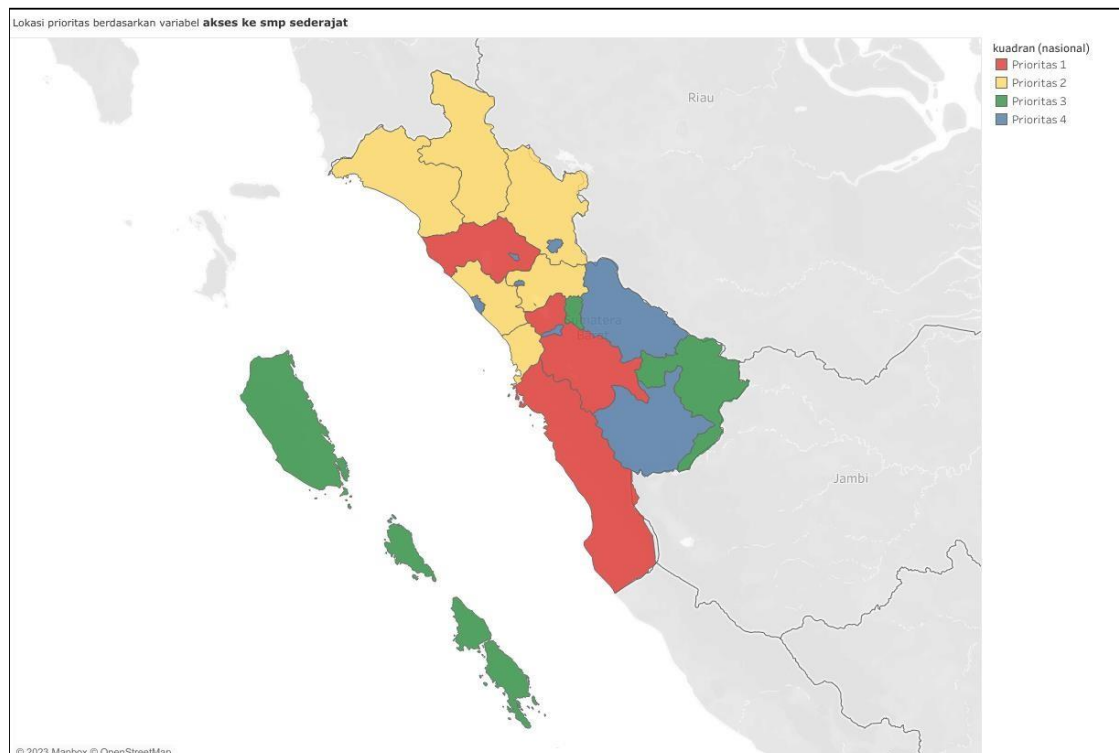
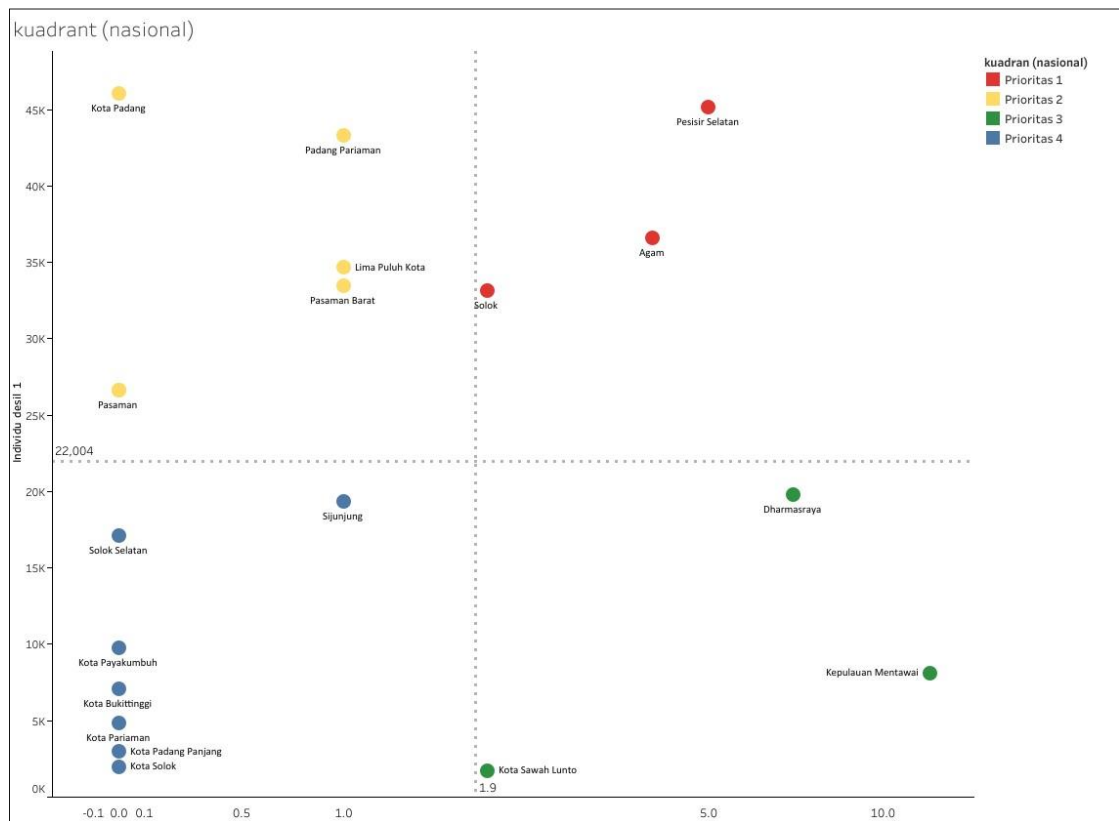
c. Penentuan Lokasi Prioritas Berdasarkan Variabel akses ke SD Sederajat



Sebaran Lokasi Prioritas Berdasarkan Variabel akses ke SD Sederajat

Sebaran Desil 1 di Sumatera Barat				
kodekab_..	Kabupaten	keluarga desil 1	individu desil 1	kuadran (nasional)
1302	Pesisir Selatan	8,841	45,157	Prioritas 1 Prioritas 3
1303	Solok	6,277	33,128	
1305	Tanah Datar	4,871	26,598	
1306	Padang Pariaman	7,492	43,292	
1307	Agam	6,720	36,607	
1308	Lima Puluh Kota	7,207	34,653	
1309	Pasaman	4,841	26,612	
1312	Pasaman Barat	5,822	33,474	
1371	Kota Padang	8,780	46,025	
1301	Kepulauan Mentawai	1,374	8,113	
1304	Sijunjung	3,974	19,299	Prioritas 1 Prioritas 3
1310	Solok Selatan	3,468	17,060	
1311	Dharmasraya	4,053	19,744	
1372	Kota Solok	359	1,958	
1373	Kota Sawah Lunto	297	1,711	
1374	Kota Padang Panjang	593	2,971	
1375	Kota Bukittinggi	1,426	7,065	
1376	Kota Payakumbuh	2,033	9,765	
1377	Kota Pariaman	844	4,836	

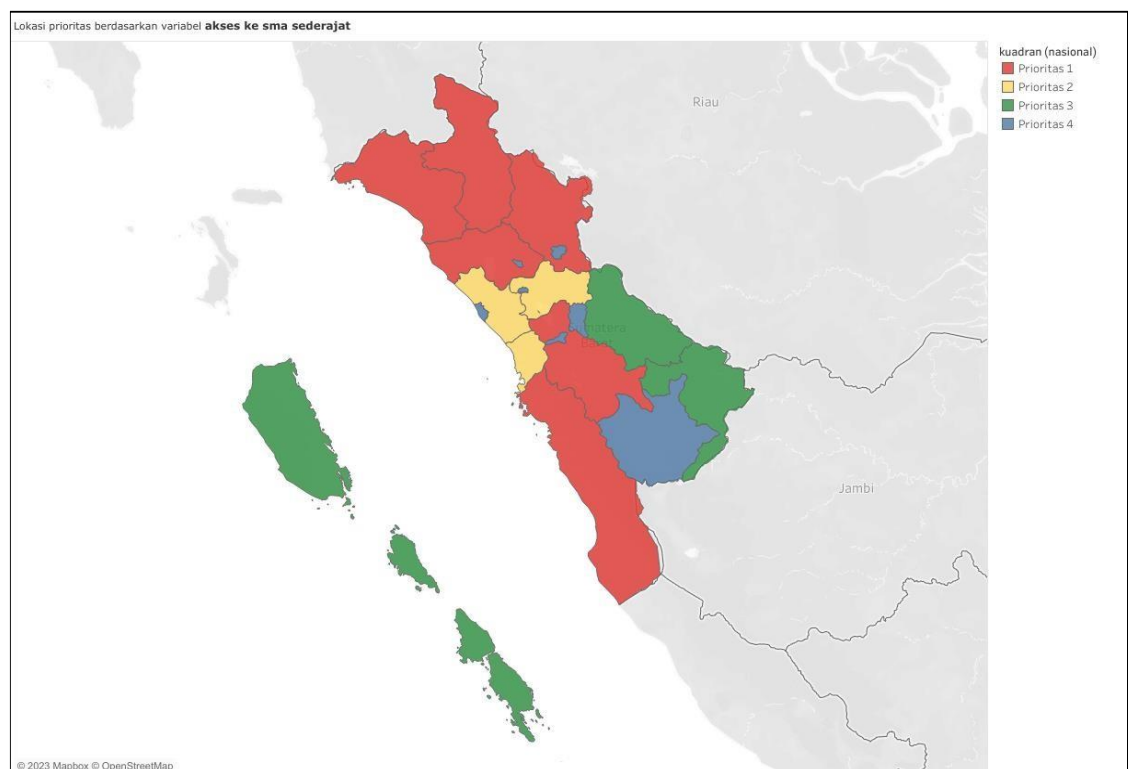
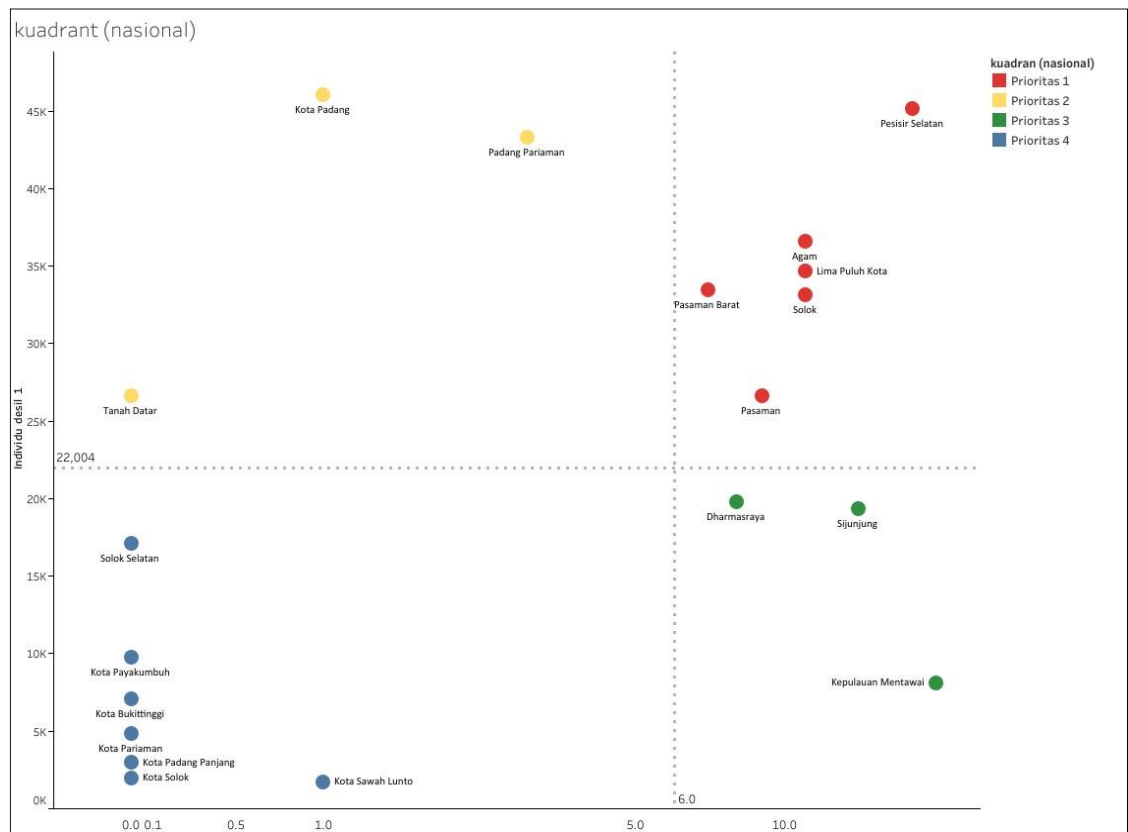
d. Penentuan Lokasi Prioritas Berdasarkan Variabel akses ke SMP Sederajat



Sebaran Lokasi Prioritas Berdasarkan Variabel akses ke SMP Sederajat

Sebaran Desil 1 di Sumatera Barat				
kodekab_...	Kabupaten	keluarga desil 1	individu desil 1	kuadran (nasional)
1302	Pesisir Selatan	8,841	45,157	Prioritas 1
1303	Solok	6,277	33,128	Prioritas 1
1307	Agam	6,720	36,607	Prioritas 1
1305	Tanah Datar	4,871	26,598	Prioritas 2
1306	Padang Pariaman	7,492	43,292	Prioritas 2
1308	Lima Puluh Kota	7,207	34,653	Prioritas 2
1309	Pasaman	4,841	26,612	Prioritas 2
1312	Pasaman Barat	5,822	33,474	Prioritas 2
1371	Kota Padang	8,780	46,025	Prioritas 2
1301	Kepulauan Mentawai	1,374	8,113	Prioritas 3
1311	Dharmasraya	4,053	19,744	Prioritas 3
1373	Kota Sawah Lunto	297	1,711	Prioritas 3
1304	Sijunjung	3,974	19,299	Prioritas 4
1310	Solok Selatan	3,468	17,060	Prioritas 4
1372	Kota Solok	359	1,958	Prioritas 4
1374	Kota Padang Panjang	593	2,971	Prioritas 4
1375	Kota Bukittinggi	1,426	7,065	Prioritas 4
1376	Kota Payakumbuh	2,033	9,765	Prioritas 4
1377	Kota Pariaman	844	4,836	Prioritas 4

e. Penentuan Lokasi Prioritas Berdasarkan Variabel Akses ke SMA Sederajat



Sebaran Lokasi Prioritas Berdasarkan Variabel Akses ke SMA Sederajat

Sebaran Desil 1 di Sumatera Barat				kuadran (nasional)
kodekab_...	Kabupaten	keluarga desil 1	individu desil 1	
1302	Pesisir Selatan	8,841	45,157	Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4
1303	Solok	6,277	33,128	
1307	Agam	6,720	36,607	
1308	Lima Puluh Kota	7,207	34,653	
1309	Pasaman	4,841	26,612	
1312	Pasaman Barat	5,822	33,474	
1305	Tanah Datar	4,871	26,598	
1306	Padang Pariaman	7,492	43,292	Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4
1371	Kota Padang	8,780	46,025	
1301	Kepulauan Mentawai	1,374	8,113	
1304	Sijunjung	3,974	19,299	Prioritas 3 Prioritas 4
1311	Dharmasraya	4,053	19,744	
1310	Solok Selatan	3,468	17,060	
1372	Kota Solok	359	1,958	Prioritas 4
1373	Kota Sawah Lunto	297	1,711	
1374	Kota Padang Panjang	593	2,971	
1375	Kota Bukittinggi	1,426	7,065	
1376	Kota Payakumbuh	2,033	9,765	
1377	Kota Pariaman	844	4,836	

3.2 Target Penurunan Persentase Kemiskinan

Kemiskinan merupakan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang perlu mendapatkan penanganan secara terkoordinasi dan terencana. Untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan di daerah, dibutuhkan penyusunan RPKD. RPKD menjadi bagian RPJMD dalam mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan menjadi wadah untuk menguraikan permasalahan kemiskinan yang kompleks di daerah. Dari itu, tujuan penanggulangan kemiskinan daerah disebutkan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- b. Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.
- c. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Atas tujuan penanggulangan kemiskinan daerah dimaksud, lebih lanjut diuraikan dalam Target Capaian Penurunan Persentase Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yang memuat target persentase penurunan kemiskinan dari kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatera Barat, selengkapnya disebutkan sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Target Capaian Penurunan Persentase Kemiskinan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kepulauan Mentawai	14,83	14,71	14,57	14,44	14,31	14,17
2	Kab. Pesisir Selatan	7,79	7,67	7,55	7,42	7,29	7,16
3	Kab. Solok	8,00	7,88	7,75	7,62	7,49	7,36
4	Kab. Sijunjung	6,93	6,81	6,69	6,56	6,43	6,30
5	Kab. Tanah Datar	4,44	4,32	4,19	4,06	3,93	3,79
6	Kab. Padang Pariaman	7,11	6,99	6,87	6,74	6,61	6,48
7	Kab. Agam	6,90	6,78	6,66	6,53	6,40	6,27
8	Kab. Lima Puluh Kota	7,02	6,90	6,77	6,65	6,52	6,39
9	Kab. Pasaman	7,33	7,20	7,08	6,95	6,81	6,68
10	Kab. Solok Selatan	7,32	7,20	7,07	6,94	6,81	6,68
11	Kab. Dharmasraya	6,36	6,24	6,12	6,00	5,87	5,74
12	Kab. Pasaman Barat	7,21	7,09	6,96	6,84	6,71	6,58
13	Kota Padang	4,45	4,33	4,22	4,10	3,98	3,85
14	Kota Solok	2,74	2,63	2,51	2,39	2,26	2,14
15	Kota Sawahlunto	2,10	2,05	2,01	1,98	1,96	1,95
16	Kota Padang Panjang	5,32	5,20	5,08	4,96	4,83	4,71
17	Kota Bukittinggi	4,59	4,48	4,36	4,24	4,12	3,99

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18	Kota Payakumbuh	5,75	5,64	5,52	5,41	5,29	5,16
19	Kota Pariaman	4,13	4,01	3,89	3,76	3,64	3,51
	Provinsi Sumatera Barat	6,40	6,28	6,16	6,03	5,90	5,77

Sumber: Data Proyeksi

Berdasarkan tabel di atas, diproyeksikan target capaian penurunan persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2021 sejumlah 6,40, tahun 2022 sejumlah 6,28 persen, tahun 2023 sejumlah 6,16 persen, tahun 2024 sejumlah 6,03 persen, tahun 2025 sejumlah 5,90 persen dan hingga tahun 2026 sejumlah 5,77 persen. Target capaian optimis dimaksud dapat dicapai lewat serangkaian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terkoordinasi lintas perangkat daerah dengan melibatkan pihak terkait utamanya swasta (badan usaha) dan lembaga swadaya masyarakat, lewat wadah bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

4.1 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2024 tahun diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Sumatera Barat periode 2019-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk tingkat kemiskinan.

Strategi APBD Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat turunnya angka kemiskinan yaitu ada dalam visi dan misi Gubernur Sumatera Barat yang telah dituangkan melalui dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2024 yaitu dalam program. Adapun Sasaran menurunnya Angka Kemiskinan adalah sebagai berikut :

- a) Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan; dan
- b) Meningkatnya Kemandirian PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Selanjutnya upaya pengentasan kemiskinan sesuai visi dan misi Gubernur Sumatera Barat senantiasa diarahkan kepada penajaman efektivitas bantuan yang selama ini bersumber dari Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa, karena kemiskinan perdesaan di Sumatera Barat jauh lebih tinggi dari perkotaan. Strategi umum penanggulangan kemiskinan yang digunakan adalah 3S: Suplemen-Sinergi-Sinkronisasi. Suplemen adalah dimana Pemerintah Provinsi menggunakan sumber APBD untuk melengkapi cakupan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang tidak terjangkau dari program pemerintah pusat. Sinergi adalah penyelarasan subyek penerima bantuan dengan program lintas sektor dan lintas hirarki, dimana Pemerintah Provinsi berperan sebagai koordinator wilayah. Sinkronisasi adalah upaya mendukung implementasi yang lebih tepat sasaran dengan koordinasi pemangku kepentingan. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

Adapun kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran yang telah ditentukan terutama pada wilayah kantong kemiskinan,
- b. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka kemiskinan,
- c. Memperluas dan meningkatkan kualitas Kelompok Usaha Bersama,
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah rentan terhadap akses (3T : Tertinggal, Terluar, Terdalam),
- e. Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa,
- f. Optimalisasi Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan; Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan meningkatkan ekonomi di Perdesaan.
- g. Mendukung sistem perlindungan sosial melalui PKH plus, berupa insentif yang lebih komprehensif dalam pengentasan penduduk miskin,
- h. Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dalam upaya penanganan penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan dan keluarga rentan.
- i. Intervensi Program Khusus Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan serta Mendorong masuknya investasi di Perdesaan
- j. Memperluas cakupan wilayah program pemberdayaan masyarakat dimana sasaran programnya sebagian besar adalah masyarakat miskin yang berada di Pedesaan;

Salah satu Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah tingginya tingkat kemiskinan perdesaan. Pertimbangan pada aspek perekonomian, dapat dilihat bahwasanya sebagian besar masyarakat miskin di Sumatera Barat memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, namun kontribusi sektor pertanian masih rendah, sedangkan Struktur PDRB Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan serta akomodasi dan makanan minuman. Adapun penjabaran dari isu strategis yang dijelaskan di atas antara lain :

- a. Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran masyarakat perdesaan;
- b. Peningkatan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka kemiskinan perdesaan melalui usaha ekonomi produktif, pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan koperasi serta bantuan permodalan dana bergulir;

- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Rentan Terhadap Akses terutama wilayah Perdesaan, Tertinggal, Terluar, Terdalam.
- d. Peningkatan kebijakan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa;
- e. Peningkatan penggunaan Dana Desa untuk membantu warga masyarakat desa terutama yang terdampak COVID 19.

4.2 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid19

Dalam upaya mengurangi dampak COVID 19 terutama pada penurunan kesejahteraan masyarakat, yang berdampak pada bertambahnya penduduk miskin Sumatera Barat, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan sinergi program Jaring Pengaman Sosial antara pemerintah dan Provinsi Sumatera Barat seperti antara program keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah Pusat didukung program PKH Plus, program perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pusat didukung oleh Program Suplemen BPNT.

Berkaitan dengan perubahan Beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perubahan RPJMD telah dilakukan pemetaan permasalahan untuk setiap indikator. Hal ini dilakukan agar program prioritas yang direncanakan sesuai dengan kondisi faktual yang sedang dan akan dihadapi. Beberapa permasalahan yang terjadi selama masa Pandemi COVID 19 adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Sumatera Barat. Hal ini terjadi karena terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat baik di sektor formal maupun informal. Dampaknya adalah masyarakat kehilangan atau terganggu sumber penghasilannya karena di-PHK, dirumahkan atau terganggu usahanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka ditetapkan program prioritas penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran terbuka. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut maka ditetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Sumatera Barat di masa pandemi Covid19, yaitu :

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta sinergitas program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
- b. untuk mengatasi pengangguran maka dilakukan dengan strategi peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan Vokasi dan Pelatihan di Balai Latihan Kerja.
- c. Dalam jangka pendek upaya Pemulihan Ekonomi Sumatera Barat menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran sebagai

dampak dari Pandemi COVID 19. Adapun beberapa upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan mulai menggerakkan kembali sektor pariwisata Sumatera Barat, serta menggerakkan sektor perdagangan dan retail yang terganggu selama masa Pandemi.

- d. Fokus menurunkan angka kemiskinan melalui kebijakan dan program perlindungan sosial reguler dengan tidak mengurangi target sasaran maupun alokasi anggaran.

4.3 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senantiasa melaksanakan upaya secara terus menerus untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mengentaskan dan mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun, pemerintah memandang penting untuk melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi pengeluarannya. Sehingga kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya semakin meningkat. Disamping itu ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (kedalaman dan keparahan kemiskinan) juga merupakan permasalahan kemiskinan Sumatera Barat yang harus diminimalisasi selain menurunkan persentase dan jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, terutama pada masa Pandemi Covid, yang seperti diketahui bersama bahwasanya akibat dari Pandemi ini terutama karena kebijakan PSBB dan PPKM, secara signifikan menurunkan aktifitas perekonomian masyarakat dan mengakibatkan menurunnya daya beli sehingga meningkatkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain :

- a. Masih Belum Pulihnya Ekonomi Nasional Dan Sumatera Barat Pada Tahun 2023,
- b. Belum Pulihnya Usaha Informal serta Masih Belum Optimalnya Pendataan Sektor Informal,
- c. Masih Terdapat Inclusion Error dan Exclusion Error Pada Data Masyarakat miskin - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial,

- d. Masih Terdapat Masyarakat Miskin Dalam DTKS yang Belum Memiliki Identitas Kependudukan (NIK), NIK Salah, NIK Ganda, dan lain-lain,
- e. Potensi Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Dampak Ekonomi Akibat Covid-19,
- f. Bertambahnya Jumlah Pengangguran Terbuka sebagai Dampak PandemiCovid-19,
- g. Verifikasi dan Validasi DTKS yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota Belum Berjalan Dengan Baik,
- h. Belum Semua Masyarakat Miskin Yang Masuk Data masyarakat miskin - DTKS mendapatkan Program.

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Sumatera Barat, dan seyogyanya upaya penanggulangannya harus bersifat lintas sektor dan lintas program berkolaborasi lintas pemerintahan baik bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan desa. Selanjutnya dapat disampaikan Program/Kegiatan sampai Sub Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Program, Sub Kegiatan dan Pagu Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024

NO	NAMA OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU
1	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	1	1	194.222.000
2	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1	1	1.885.000.000
3	Dinas Kehutanan	2	12	9.843.520.000
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	14	19.387.642.000
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	7	421.920.330
6	Dinas Kesehatan	1	8	81.905.830.947
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	2	5.279.430.907
8	Dinas Pangan	2	2	5.010.480.350
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	200.000.000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	8	1.392.878.400
11	Dinas Pendidikan	1	4	431.513.370.000
12	Dinas Perhubungan	1	2	729.000.000
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	1.500.000
14	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	3	6	2.527.284.234
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	1	350.000.000
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	4	1.207.083.000
17	Dinas Sosial	4	45	57.780.122.184
18	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	1	17	42.555.877.390
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	2	3.885.000.000
	JUMLAH	34	138	666.070.161.742

Rincian Program, Sub Kegiatan dan Pagu Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024

NO	NAMA OPD PENGAMPU	PROGRAM	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	194.222.000
2	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.885.000.000
3	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	150.000.000
4	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2.580.000.000
5	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.092.600.000
6	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	961.320.000
7	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	912.400.000
8	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	759.800.000
9	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	631.120.000
10	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	622.600.000
11	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	607.000.000
12	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	594.160.000
13	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	565.520.000

NO	NAMA OPD PENGAMPU	PROGRAM	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
14	DINAS KEHUTANAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	367.000.000
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	200.000.000
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Pendapatan	50.000.000
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	317.817.600
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	100.000.000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan	720.000.000
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatkan Pendapatan	586.295.900
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatkan Pendapatan	470.000.000
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatkan Pendapatan	471.888.500
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan	8.143.640.000
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan	3.450.000.000
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan	530.000.000
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan	500.000.000
27	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	3.718.000.000

NO	NAMA OPD PENGAMPU	PROGRAM	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	130.000.000
29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	37.281.329
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	171.341.061
31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	40.000.000
32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	50.000.000
33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	30.000.000
34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Mengurangi Beban Pengeluaran	63.297.940
35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	30.000.000
36	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	2.512.207.400
37	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	78.416.311.865
38	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Mengurangi Beban Pengeluaran	118.500.000
39	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran	180.000.000
40	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	15.000.000

NO	NAMA OPD PENGAMPU	PROGRAM	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
41	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	496.811.682
42	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran	147.000.000
43	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	20.000.000
44	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan Pendapatan	927.822.200
45	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatkan Pendapatan	4.351.608.707
46	DINAS PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	4.931.097.100
47	DINAS PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	79.383.250
48	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Meningkatkan Pendapatan	200.000.000
49	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	25.000.000
50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	892.132.000
51	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	140.000.000

NO	NAMA OPD PENGAMPU	PROGRAM	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
	DAN KELUARGA BERENCANA				
52	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	74.903.000
53	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	66.653.000
54	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	70.000.000
55	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	94.190.400
56	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	30.000.000
57	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran	238.300.000.000
58	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran	147.360.000.000
59	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Mengurangi Beban Pengeluaran	40.093.370.000
60	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran	5.760.000.000
61	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	711.000.000

NO	NAMA OPD PENGAMPU	PROGRAM	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
62	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	18.000.000
63	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Meningkatkan Pendapatan	1.500.000
64	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Meningkatkan Pendapatan	972.000.000
65	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Meningkatkan Pendapatan	200.000.000
66	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Meningkatkan Pendapatan	100.000.000
67	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	839.400.000
68	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	315.884.234
69	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	100.000.000
70	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	350.000.000
71	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	212.622.500
72	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Meningkatkan Pendapatan	380.622.000
73	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Meningkatkan Pendapatan	513.838.500
74	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	100.000.000
75	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	4.278.112.000

NO	NAMA OPD PENGAMPU	PROGRAM	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
76	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	660.645.000
77	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	403.813.000
78	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	700.000.000
79	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	257.217.700
80	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	198.395.700
81	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pelayanan Dukungan Psikososial	Mengurangi Beban Pengeluaran	54.167.600
82	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Mengurangi Beban Pengeluaran	596.702.000
83	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Mengurangi Beban Pengeluaran	592.494.097
84	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Mengurangi Beban Pengeluaran	576.752.742
85	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Mengurangi Beban Pengeluaran	158.100.000
86	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	158.785.000
87	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	36.566.714
88	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	22.100.000
89	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	15.640.000

NO	NAMA OPD PENGAMPU	PROGRAM	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
90	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	34.500.000
91	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	12.600.000
92	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	7.420.000
93	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemulasaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	24.000.000
94	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemulasaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	17.500.000
95	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Mengurangi Beban Pengeluaran	94.357.025
96	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	417.042.200
97	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	5.216.122.166
98	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	1.908.764.200
99	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran	11.550.000
100	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Mengurangi Beban Pengeluaran	2.024.317.000
101	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Mengurangi Beban Pengeluaran	100.773.000
102	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Mengurangi Beban Pengeluaran	47.899.900
103	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	28.593.531.750

NO	NAMA OPD PENGAMPU	PROGRAM	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
104	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.817.550.000
105	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.281.000.000
106	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.067.500.000
107	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Mengurangi Beban Pengeluaran	826.070.000
108	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Mengurangi Beban Pengeluaran	14.782.780
109	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Mengurangi Beban Pengeluaran	3.178.700
110	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	123.613.000
111	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	16.062.710
112	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	11.518.000
113	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	3.103.219.500
114	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.281.000.000
115	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	640.500.000
116	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	146.670.250
117	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	133.628.000
118	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	19.950.000

NO	NAMA OPD PENGAMPU	PROGRAM	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
119	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	74.010.450
120	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2.310.000.000
121	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.531.311.098
122	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	268.543.560
123	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	67.751.480
124	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	6.524.565.000
125	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	4.609.758.494
126	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.147.235.000
127	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	184.753.000
128	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	130.815.500
129	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2.411.500.000
130	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.809.475.301
131	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	157.930.000
132	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	230.000.000

NO	NAMA OPD PENGAMPU	PROGRAM	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
133	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.028.888.235
134	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	772.960.672
135	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2.625.973.474
136	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	16.744.416.576
137	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	2.430.000.000
138	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	1.455.000.000
TOTAL PAGU					666.070.161.742